BADAN POM

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN I

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2025

Jakarta
2025

BADAN POM

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN I

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2025

Jakarta
2025

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan POM untuk Triwulan I Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Deputi II BPOM dalam Triwulan I Tahun 2025, serta merupakan implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Pedoman SAKIP Badan POM yang terbaru.

Dalam penyusunan LAKIP Interim ini, kinerja Deputi II BPOM diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Deputi II BPOM Tahun 2025–2029. Laporan ini memuat capaian indikator kinerja utama, analisis atas hasil yang diperoleh, serta identifikasi kendala dan langkah tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas ke depan.

Kami menyadari bahwa dalam proses penyelenggaraan kinerja, masih terdapat berbagai tantangan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, melalui laporan ini, kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, serta memperkuat kontribusi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Deputi II BPOM selama Triwulan I Tahun 2025, serta dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai akuntabilitas kinerja Deputi II BPOM dan menjadi dasar perbaikan serta peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jakarta, April 2025

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Mohamad Kashuri

Executive Summary

Pada Triwulan I Tahun 2025, Deputi II BPOM telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengawasan terhadap obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Pelaksanaan kinerja pada periode ini menunjukkan capaian yang positif dengan nilai kinerja organisasi sebesar 97,90, mencerminkan akuntabilitas pelaksanaan program dan efektivitas implementasi kegiatan.

Dari sisi anggaran, realisasi belanja Deputi II mencapai Rp2.511.841.620 atau 15,56% dari pagu efektif sebesar Rp16.145.965.000, sesuai dengan target triwulanan yang tercantum dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar 15%. Hal ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan disiplin dan selaras dengan tahapan pelaksanaan program.

Capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator utama telah mencapai atau melampaui target, antara lain: 1) Persentase Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu; 2) Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar; 3) Persentase Fasilitas Distribusi yang Memenuhi Ketentuan; 4) Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target atau belum dapat disimpulkan, seperti indikator tindak lanjut hasil pengawasan oleh lintas sektor, pengawasan sarana produksi, serta indikator yang pelaksanaannya dijadwalkan pada triwulan berikutnya.

Permasalahan utama yang dihadapi mencakup: 1) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh UPT; 2) Keterlambatan pelaporan data dari daerah; 3) Tantangan koordinasi lintas sektor dan keterbatasan waktu eksekusi kegiatan awal tahun.

Sebagai langkah tindak lanjut, Deputi II BPOM telah menyusun strategi pemecahan melalui percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi dengan UPT, pemanfaatan sistem digital dalam pelaporan, serta penguatan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

Ke depan, Deputi II akan terus menjaga konsistensi dalam pelaksanaan program, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran berbasis hasil, serta meningkatkan efektivitas pengawasan untuk mendukung terwujudnya produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Daftar Isi

Isi

Kata Pengantar i

Executive Summary ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I - Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 2
1.3 Struktur Organisasi Deputi II 2
1.4 Isu Strategis 3

BAB II Perencanaan Kinerja 5

2.1 Uraian Singkat Renstra 5
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 7
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) 9
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 12
2.5. Metode Pengukuran 18

BAB III Akuntabilitas Kinerja 36

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 36
3.2 Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi 69
3.3 Realisasi Anggaran 69

BAB IV Penutup 71

Lampiran 73

Daftar Tabel

Tabel 1 : Rencana Kinerja Tahunan 2025 8
Tabel 2 : Perjanjian Kinerja Deputi II Tahun 2025 10
Tabel 3 : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM Tahun 2025 13
Tabel 4 : Kriteria Capaian Indikator Kinerja 34
Tabel 5 : Kriteria Predikat Nilai Kerja Organisasi 34
Tabel 6 : Nilai Kinerja Organisasi TW I tahun 2025 37
Tabel 7 Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2025 39
Tabel 8 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap target Triwulan I 2025 41
Tabel 9 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap target Tahunan 2025 41
Tabel 10 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Triwulan I 2025 42
Tabel 11 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Tahunan 2025 43
Tabel 12 :Perbandingan realisasi kinerja Persentase Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap target Triwulan I 2025 44
Tabel 13 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap target Tahunan 2025 45
Tabel 14 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor terhadap target Triwulan I 2025 46
Tabel 15 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor terhadap target Tahunan 2025 47
Tabel 16 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025 48
Tabel 17 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025 49
Tabel 18 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025 50
Tabel 19 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025 51

Tabel 20 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025 52
Tabel 21 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025 53
Tabel 22 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025 54
Tabel 23 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025 55
Tabel 24 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025 56
Tabel 25 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025 57
Tabel 26 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025 58
Tabel 27 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025 59
Tabel 28 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025 60
Tabel 29 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025 61
Tabel 30 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025 63
Tabel 31 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025 63
Tabel 32 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025 65
Tabel 33 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025 65
Tabel 34: Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap target Triwulan I 2025 67
Tabel 35 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap target Tahunan 2025 68
Tabel 36 : Peengukuran Tingkat Efisiensi per Sasaran Program 69

Daftar Gambar

Gambar 1 : Struktur Organisasi Deputi II BPOM 3

BAB I

PENDAHULUAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2025

BAB I - Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif, baik dari segi pertumbuhan jumlah produk maupun diversifikasi jenisnya. Di tengah peluang tersebut, tantangan yang dihadapi Deputi II BPOM semakin kompleks. Beredarnya produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, penyalahgunaan klaim kesehatan dalam promosi, serta meningkatnya transaksi produk melalui platform digital menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan efektif.

Selain itu, tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi masih perlu ditingkatkan, begitu pula literasi masyarakat dalam memilih produk yang aman dan bermutu. Deputi II BPOM juga dihadapkan pada kebutuhan untuk mendukung inovasi industri nasional, khususnya dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya menuntut efisiensi dalam pelaksanaan program dan optimalisasi pelayanan publik.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Deputi II BPOM memiliki peran yang sangat strategis. Deputi II bertugas untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik guna memastikan perlindungan kesehatan masyarakat.

Melalui pengawasan yang efektif, edukasi publik, pemberdayaan pelaku usaha, serta transformasi pelayanan berbasis digital, Deputi II BPOM berupaya menciptakan ekosistem pengawasan yang adaptif, transparan, dan berdaya saing. Pelaksanaan tugas ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan dan mutu produk yang beredar, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan industri nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Deputi II BPOM merupakan salah satu unsur pelaksana teknis di lingkungan BPOM yang berperan penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di Indonesia.Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi II BPOM bertugas untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Dalam menjalankan tugas tersebut, Deputi II melaksanakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan pengawasan sebelum beredar dan selama beredar, meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- Pelaksanaan kebijakan pengawasan sebelum beredar dan selama beredar;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPOM.

1.3 Struktur Organisasi Deputi II

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, Deputi II BPOM didukung oleh lima direktorat teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling bersinergi, yaitu:

1. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
4. Direktorat Pengawasan Kosmetik;
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Struktur organisasi Deputi II dirancang untuk memperkuat integrasi antara aspek regulasi, pengawasan, pelayanan publik, pemberdayaan, dan pengembangan daya saing industri.

Setiap direktorat bekerja dalam koordinasi yang erat untuk memastikan bahwa seluruh proses pengawasan, mulai dari penyusunan regulasi, pre-market evaluation, pengawasan produksi dan distribusi, hingga pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, berjalan secara harmonis, efektif, dan selaras dengan tujuan besar BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing nasional.

Gambar 1 : Struktur Organisasi Deputi II BPOM

1.4 Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi II BPOM menghadapi sejumlah isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan program dan pencapaian kinerja, yaitu:

1. Pengawasan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital

   Transformasi pengawasan dan pelayanan publik menuju sistem digital menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan. Deputi II BPOM mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan produk dan pelayanan kepada pelaku usaha dan masyarakat.
2. Pemahaman dan Kepatuhan Pelaku Usaha/Stakeholder terhadap Regulasi

   Masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami ketentuan regulasi yang berlaku. Deputi II BPOM terus meningkatkan edukasi, bimbingan teknis, dan sosialisasi untuk membangun kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan pelaku usaha.
3. Literasi Konsumen yang Rendah dan Peran Serta Masyarakat

   Tingkat literasi masyarakat mengenai keamanan, mutu, dan klaim produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik masih perlu ditingkatkan. Deputi II

BPOM berupaya memperluas kegiatan edukasi publik untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan.

4. Kapasitas dan Daya Saing UMKM

   Sebagian besar UMKM di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik belum memiliki kapasitas produksi dan pemenuhan standar yang optimal. Deputi II BPOM fokus pada program pendampingan dan fasilitasi penerapan standar mutu dan keamanan bagi UMKM.

5. Pengembangan dan Pemanfaatan Obat Bahan Alam

   Potensi obat bahan alam di Indonesia sangat besar namun masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Deputi II BPOM mendorong inovasi dan pengembangan produk berbasis bahan alam yang memenuhi aspek keamanan, mutu, dan manfaat.

6. Pencantuman Promosi/Iklan yang Overclaim

   Masih ditemukan praktik promosi dan iklan produk yang mengandung klaim berlebihan atau tidak sesuai dengan ketentuan. Deputi II BPOM memperketat pengawasan dan pembinaan terkait ketaatan iklan untuk melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan.

7. Peredaran Produk OBA Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang

   Produk obat tradisional yang mengandung BKO dan kosmetik dengan bahan berbahaya masih beredar di pasaran. Deputi II BPOM terus melakukan intensifikasi pengawasan, sampling, dan penindakan terhadap produk-produk tersebut untuk menjaga keselamatan konsumen.

8. Pengawasan Peredaran OBA, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik di E-commerce

   Maraknya transaksi online menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan produk ilegal dan tidak memenuhi syarat. Deputi II BPOM memperkuat pengawasan berbasis patroli siber dan bekerja sama dengan platform e-commerce untuk mengendalikan peredaran produk.

9. Efisiensi Anggaran

   Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, Deputi II BPOM berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan melalui prinsip efisiensi anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja, dengan perencanaan dan eksekusi yang lebih tepat sasaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2025

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1 Uraian Singkat Renstra

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**.

Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Badan POM Tahun 2025-2029, maka Visi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 "

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera**: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Dalam upaya mewujudkan visi, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menetapkan misi organisasi yang sejalan dengan misi BPOM sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Membangun SDM unggul terkait obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Deputi II BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan Deputi II BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi, yang sejalan dengan Tujuan BPOM:

1. **Terwujudnya Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu**: Tujuan ini menegaskan komitmen Deputi II BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini

merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, Deputi II BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Deputi II BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, Deputi II BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Deputi II BPOM merupakan acuan bagi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025. Rencana Kinerja ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik No. HK.02.02.4.09.24.46 TAHUN 2024 pada tanggal 19 September 2024. Terdapat perubahan target kinerja Deputi II BPOM pada tahun 2025, yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM tahun 2025, sehingga perhitungan kinerja akan menggunakan target sebagaimana terdapat pada Perjanjian

Kinerja. Rencana Kinerja Deputi II BPOM Tahun 2025 adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1 : Rencana Kinerja Tahunan 2025

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65,00
2		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	67,00
3		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	61,00
4		Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86,00
5		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00
6	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	20,00%
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	84,00
8	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	87,50
9	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase kemandirian pelaku usaha OBA dalam rangka inovasi obat bahan alam	51,00%
10		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	60,00
11		Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56,00%
12		Persentase Industri Obat bahan Alam yang meningkat maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12,00

No	Sasaran	Indikator	Target
13	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,69
14	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91,68
15		Nlai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,45
16		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	95,36
17		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,40

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM merupakan dokumen formal yang memuat komitmen antara pejabat yang diberi amanah sebagai Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II) dengan Kepala Badan POM selaku atasan langsung. Dokumen ini berisi pernyataan kesanggupan Deputi II dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Badan POM, dengan mengacu pada indikator kinerja yang terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan masyarakat.

Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun sebagai bagian dari proses manajemen kinerja berbasis hasil (result-based management), yang bertujuan untuk:

- Menjadi dasar evaluasi kinerja individu pimpinan unit organisasi,
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja unit kerja,
- Mendorong pencapaian sasaran strategis organisasi melalui indikator kinerja utama yang jelas dan terukur,
- Memastikan bahwa seluruh sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Pada Tahun 2025, Deputi II BPOM menetapkan 25 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengukuran capaian kinerja. Indikator tersebut mencakup aspek pengawasan produk, pelayanan publik, inovasi, koordinasi lintas sektor, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 2 : Perjanjian Kinerja Deputi II Tahun 2025

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65,00%
	IKSP 2	Persentase Seplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,00%
	IKSP 3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,00%
	IKSP 4	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83,00%
	IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00%
	IKSP 6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86,00%
	IKSP 7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85,00%
	IKSP 8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81,00%
	IKSP 9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70,00%
	IKSP 10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89,00%
	IKSP 11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78,00%
	IKSP 12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78,00%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	IKSP 13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87,00%
	IKSP 14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71,00%
Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OT, SK dan Kos	IKSP 15	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	2,00%
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IKSP 16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	86,87
Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	51,00%
	IKSP 18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	60,00%
	IKSP 19	Persentase Industri Kosmetik yang mengikti program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56,00%
	IKSP 20	Persentase Industri Obat Bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12,00%
Layanan Publik BPOM yang Prima	IKSP 21	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,70
Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSP 22	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	89.96
	IKSP 23	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	81.66
	IKSP 24	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	5,00
	IKSP 25	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kos	2.95

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Deputi II BPOM menyajikan target kinerja Triwulan pada tiap indikator kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja. RAPK Deputi II BPOM tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM Tahun 2025

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	3.582.245.500
	IKSP 2	Persentase Seplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	2.569.919.500
	IKSP 3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	3.552.695.000
	IKSP 4	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												83	3.598.766.000
	IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	902.584.000
	IKSP 6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	354.341.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	IKSP 7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	354.341.000
	IKSP 8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	1.694.533.000
	IKSP 9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	354.341.000
	IKSP 10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	354.341.000
	IKSP 11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	957.720.000
	IKSP 12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	500.130.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	IKSP 13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	500.130.000
	IKSP 14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	931.538.000
Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OT, SK dan Kos	IKSP 15	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman												2	1.000.000.000
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IKSP 16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu												86.87	5.226.369.000
Meningkatnya efektifitas regulatory	IKSP 17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	40	40	40	41.5	41.5	41.5	42.5	42.5	42.5	45	45	51	7.028.831.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos						3	10	15	20	35	45	60	4.964.569.000
	IKSP 19	Persentase Industri Kosmetik yang mengikti program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh												56	1.100.000.000
	IKSP 20	Persentase Industri Obat Bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini												12	400.000.0000
Layanan Publik BPOM yang Prima	IKSP 21	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan												4.7	8.760.036.000
Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit	IKSP 22	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												89.96	1.538.957.950

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Organisasi yang optimal	IKSP 23	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												81.66	304.760.600
	IKSP 24	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												5	960.170.500
	IKSP 25	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kos												2.95	425.419.950

2.5. Metode Pengukuran

Metode pengukuran indikator kinerja disusun untuk memastikan bahwa setiap pencapaian dapat diukur secara objektif, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen metode pengukuran ini memuat definisi operasional indikator, satuan ukur, cara penghitungan, unit penanggung jawab data, serta kriteria keberhasilan capaian.

1. **Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu**

   Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah.

   Kriteria Obat Bahan Alam aman dan bermutu, meliputi: 1) Memiliki NIE yang berlaku, 2) Tidak kedaluwarsa, 3) Tidak rusak, 4) Memenuhi ketentuan penandaan, dan 5) Memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

   Alur pemeriksaan hasil sampling obat bahan alam dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 . dengan ketentuan:

   1) Yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
   2) Jika poin 1,2 dan 3 tidak terpenuhi maka tidak dilakukan pengujian.
   3) Jika poin 4 tidak dipenuhi maka tetap dilakukan pengujian.
   4) Untuk sampel dengan Klaim risiko tinggi yang tidak memenuhi point 1 maka tetap dilakukan pengujian.

   Sampel obat bahan alam tidak aman dan bermutu dihitung berdasarkan satuan bets**.** Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan.

2. Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu

Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.

Kriteria Suplemen Kesehatan aman dan bermutu, meliputi: 1) Memiliki NIE yang berlaku, 2) Tidak kedaluwarsa, 3) Tidak rusak, 4) Memenuhi ketentuan penandaan, dan 5) Memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling obat bahan alam dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 . yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Sampel suplemen kesehatan tidak aman dan bermutu dihitung berdasarkan satuan bets.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan.

3. Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling kosmetik dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel kosmetik meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel kosmetik mencakup sampel UPT.

Kriteria kosmetik aman dan bermutu, meliputi: 1) Memiliki NIE/bukan produk ilegal termasuk palsu, 2) Tidak kedaluwarsa, 3) Tidak rusak, 4) Memenuhi ketentuan penandaan, dan 5) Memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling kosmetik dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin c.1 hingga poin c.5 . yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin c.1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin c.2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk kosmetik TMS dihitung berdasarkan satuan bets.

Jika tidak termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel kosmetik yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Kometik yang Aman dan Bermutu adalah Direktorat Pengawasan Kosmetik.

4. Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan instrumen yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan pengawasan obat dengan mengacu pada instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Admistrasi Negara (LAN).

Ruang lingkup kebijakan yang disepakati sebagai Objek yang akan dinilai yaitu kebijakan dalam bentuk Peraturan Badan POM yang memenuhi ketentuan:

a) Memiliki jangka waktu pemberlakukan selama 2 (dua) tahun terakhir;
b) Bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang hanya memiliki materi muatan pencabutan peraturan perundang-undangan lainnya,
c) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan teknis tugas dan fungsi Badan POM,

d) Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulas Kebijakan) dan Pelaksanaan Kebijaksanaan (Implementasi danEvaluasi Kebijakan), dan
e) Pengukuran Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan setiap tahun.

Cara Perhitungan dan Formula : Berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh LAN.

Kriteria yang digunakan adalah:

a) 91,00 – 100 : Unggul
b) 80,00 – 90,99 : Sangat Baik
c) 65,00 – 79,99 : Baik
d) 50,00 – 64,99 : Cukup
e) < 50,00 : Kurang

5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari lintas sektor terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat. Lintas sektor meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan dan Direktorat Pengawasan Kosmetik.

6. **Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan, dan Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan**

   Sarana produksi Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah adalah jumlah sarana produksi Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, dan Industri Kosmetik.

   Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada peraturan dan/atau pedoman yang berlaku terkait pengawasan Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

   Cara Perhitungan:

   =(Jumlah sarana produksi Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan / Jumlah sarana produksi Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperiksa) x 100%

   Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran indikator kinerja ini yaitu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan, Direktorat Pengawasan Kosmetik.

7. **Persentase Iklan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan**

   Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Pengawasan iklan dilakukan baik rutin dan insidental terhadap iklan yang dipublikasikan sesuai dengan target dan tanggungjawab UPT berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Kesesuaian pelaksanaan pengawasan iklan oleh UPT mengacu pada Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta peraturan mengenai periklanan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik maupun ketentuan terkait.

Cara perhitungan: Jumlah iklan yang diawasi sesuai ketentuan/jumlah target pengawasan iklan *100%.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan dan Direktorat Pengawasan Kosmetik.

8. Persentase Kabupaten/kota sadar Jamu Aman

Program Sadar Jamu Aman merupakan upaya peningkatan pelestarian jamu melalui pengembangan dan pemanfaatan jamu serta kesadaran konsumsi jamu yang aman untuk kesehatan oleh masyarakat. Program Sadar Jamu Aman akan dilaksanakan dengan melibatkan Kabupaten/Kota serta *influencer*.

Perhitungan indikator= Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman .

Cara Perhitungan Jumlah Kabupaten/Kota yang berkomitmen melaksanakan Program Sadar Jamu Aman :

Setiap tahun target nya 10 kabupaten/kota yang berkomitmen melaksanakan program sadar jamu Aman dan tiap tahun kumulatif dari tahun sebelumnya sehingga di akhir RPJMN tahun 2029 jumlah nya 50 kabupaten/kota yang melaksanakan program sadar jamu aman.

Target tahunan (%) dihitung dari capaian kabupaten/kota pertahun dibagi jumlah komulatif kabupaten/kota di akhir RPJMN tahun 2029 (50).

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman adalah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

9. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM.

Kesadaran diukur melalui 3 aspek, yaitu:

a. Pengetahuan (*Knowledege*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi sediaan farmasi dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi dan makanan yang aman dan bermutu.
c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi dan Makanan dengan baik.

Indeks kesadaran masyarakat dilakukan melalui survei dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling* dimana pengembangan desain dan metodologi survei kesadaran masyarakat dilakukan bekerja sama dengan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei - Badan Pusat Statistik.

Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan per aspek pengetahuan, sikap dan perilaku serta bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran. Indeks Kesadaran Nasional diperoleh dari penjumlahan atas hasil perkalian indeks kesadaran setiap komoditi dengan bobot masing-masing komoditi.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu, yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

10. Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar

Kemandirian bahan baku OBA yaitu:

1) Bahan Baku OBA yang bermutu adalah bahan baku yang dihasilkan dari Industri Ekstrak Bahan Alam telah terstandar, baik proses produksi yang distandarisasi maupun bahan baku yang terstandar.
2) Industri Ekstrak Bahan Alam adalah Industri yang memproduksi bahan baku alam bentuk ekstrak, dimana bahan baku alam tersebut merupakan bahan baku/raw material bagi industri obat bahan alam, UMK, Industri Kosmetik dan Industri pangan. Proses produksi bahan baku alam dengan menerapkan CPOTB Tahun 2021.
3) Bahan Baku Obat Bahan Alam adalah bahan baku yang berasal dari tanaman dan hewan berupa ekstrak yang di diproduksi oleh Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA).

Definisi tahapan pendampingan inovasi obat bahan alam:

1) Penyusunan protokol uji praklinik/klinik (80%);
2) Pelaksanaan penelitian (15%) mencakup persiapan (5%) dan pelaksanaan (10%);
3) Standardisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (5%); dan

4) Jika hasil sudah selesai atau jika dalam 3 bulan pendaftar tidak merespon surat Tambahan Data dianggap selesai (100%).

Cara Perhitungan: menghitung Rata-rata dari Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam, Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik obat bahan alam, suplemen kesehatan dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif, Persentase peningkatan penelitian uji pra klinik dan uji klinik Jamu yang didampingi sesuai standar, Persentase Industri Ekstrak bahan alam (IEBA) yang menghasilkan bahan Baku OBA yang bermutu.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar, yaitu Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

11. Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik

Ruang lingkup UMK mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); dan
b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik adalah UMKM yang memperoleh Sertifikat CPOTB Bertahap/ Sertifikat CPKB / SPA CPKB dan/ atau Nomor Izin Edar (NIE).

Cara Perhitungan : Jumlah UMKM yang memperoleh Sertifikat CPOTB Bertahap/ Sertifikat CPKB / SPA CPKB dan/ atau Nomor Izin Edar (NIE) dibagi jumlah UMKM OBA dan Kos yang didampingi dikali 100%.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik, yaitu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

12. Persentase Industri Kosmetik yang Mengikuti Program Maturitas yang dapat Menerapkan CPKB Secara Penuh

Industri kosmetik adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki bukti penerapan CPKB.

Program maturitas adalah program pembinaan/penilaian yang bertujuan mengarahkan industri kosmetik sehingga dapat menerapkan aspek CPKB secara penuh.

Cara perhitungan Jumlah industri yang berhasil menerapkan CPKB secara penuh setelah menerapkan program dibandingkan sebelum menerapkan program (masih menerapkan CPKB secara bertahap).

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh, yaitu Direktorat Pengawasan Kosmetik.

13. Persentase Industri Obat Bahan Alam yang Meningkat Maturitasnya dalam Penerapan CPOTB Terkini

Industri Obat Bahan Alam adalah Industri yang memproduksi OT, Suplemen keseahtan, Obat Kuasi yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri Obat Bahan Alam ini wajib menerapkan CPOTB secara penuh/full aspek sesuai pedoman CPOTB terkini yaitu PerBPOM 25 Tahun 2021 tentang Penerapan CPOTB.

Maturitas Industri Obat Bahan Alam perlu dinilai dan ditetapkan dengan tools penilaian maturitas yang mencakup Aspek Pemenuhan CPOTB (indeks cluster berdasarkan data mapping dan track record hasil pemeriksaan rutin CPOTB) dan Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi di Bidang Obat Bahan Alam (Track Record

Keamanan, Mutu, Penandaan dan Penerapan Pharmacovigilance). Program maturitas ini bertujuan untuk mengelompokkan Industri Obat Bahan Alam ke dalam level maturitas tertentu sehingga pengawasan yang dilakukan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Industri dengan tingkat maturitas yang tinggi adalah industri telah menerapkan CPOTB secara paripurna dan patuh terhadap regulasi di bidang OTSK, kepada Industri yang seperti ini dapat dilakukan less inspection karena dinilai telah mampu menerapkan jaminan mutu dalam melakukan produksi obat bahan alam. Industri yang seperti ini dapat digunakan sebagai mitra Badan POM sebagai orang tua angkat UMKM, mitra dalam peningkatan kompetensi petugas Badan POM misal sebagai tempat PKL, mitra dalam pembuatan konten edukasi Badan POM, dan lain-lain.

Sebagai dampak adanya *less inspection* pada Industri dengan tingkat maturitas tinggi, maka *focused inspection* dapat dilakukan pada Industri dengan tingkat maturitas menengah dan rendah untuk mengarahkan pada peningkatan level maturitas.

Cara Perhitungan: Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya /Jumlah Seluruh Industri Obat Bahan Alam di Indonesia.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini, yaitu Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

14. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
2) Profesionalitas SDM (18%);
3) Sarana Prasarana (15%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);

6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Cara Perhitungan:

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)

Kategori nilai:

a) 0 - 1,00 F Gagal
b) 1,01 - 1,50 E Sangat Buruk
c) 1,51 - 2,00 D Buruk
d) 2,01 - 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan)
e) 2,51 - 3,00 C Cukup
f) 3,01 - 3,50 B- Baik (Dengan Catatan)
g) 3,51 - 4,00 B Baik
h) 4,01 - 4,50 A- Sangat Baik
i) 4,51 - 5,00 A Pelayanan Prima

15. Nilai Pembangunan ZI Deputi II BPOM

Nilai pembangunan zona integritas merupakan hasil dari implementasi pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Unit Organisasi.

Cara Perhitungan:

Nilai dari hasil evaluasi zona integritas Unit Organisasi yang dinilai oleh tim evaluator Zona Integritas BPOM.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Nilai Pembangunan ZI Deputi II BPOM adalah Inspektorat Utama.

16. Nlai AKIP Deputi II BPOM

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan sistem penerapan manajemen kinerja Inspektorat Utama yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat penyesuaian komponen dan bobot penilaian dalam evaluasi SAKIP, serta adanya Surat Edaran Inspektur Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Pi.04.7.72.01.23.01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

Komponen:

a) Perencanaan Kinerja (bobot 24)
b) Pengukuran Kinerja (bobot 24)
c) Pelaporan Kinerja (bobot 12)
d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20)
e) Capaian Kinerja (20)
f) Sumber Data:
g) Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Utama dari Tim Evaluator AKIP BPOM

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Nilai AKIP Deputi 2 adalah Inspektorat Utama.

17. Nilai Kinerja Anggaran Deputi II BPOM

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Inspektorat Utama yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

1) Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)
   Indikator pembentuk Nilai Evaluasi Anggaran sebagai berikut:
   a) Efektivitas (75) dengan rincian:

- Capaian indikator kinerja program (IKP) dengan bobot 30;
- Agregasi capaian RO Satker dengan bobot 45;

b) Efisiensi (25) dengan rincian:

- Penggunaan SBK dengan bobot 10
- Efisiensi SBK dengan bobot 15
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

2) Pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA):

a) Revisi DIPA (10%);
b) Deviasi Hal III DIPA(10%);
c) Penyerapan Anggaran (20%);
d) Belanja kontraktual (10%);
e) Penyelesaian Tagihan (10%);
f) Pengelolaan UP dan TUP (10%);
g) Dispensasi SPM (5%);
h) Capaian Output (25%);

Cara Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Deputi II BPOM, yaitu:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Keterangan:

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	**Kategori**	**Konversi NIlai**
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Nilai Kinerja Anggaran Deputi II BPOM adalah Kementerian Keuangan.

18. Indeks Manajemen Risiko Deputi 2

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

a. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah stau alat manejeemn dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan,
b. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko, dan
c. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

Cara Perhitungan:

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas:

Skor Maturitas = (Skor Total)/16

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko.
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan evaluasi oleh Inspektorat Utama.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Indeks Manejemen Risiko Deputi 2 adalah Inpektorat Utama.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 4 : Kriteria Capaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	> 110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	< 60%	

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

(1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
(2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 : Kriteria Predikat Nilai Kerja Organisasi

Predikat NKO	Nikai Kerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	> 100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$\mathbf{IE} ¿ \frac{\%\,CapaianOutput}{\%\,Capaianinput} \mathbf{IE} ¿ \frac{100\,\%}{100\,\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No.	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,20	100% (efisien)
3	0,21 – 0,40	95% (efisien)
4	0,41 – 0,60	92% (efisien)
5	0,61 – 0,80	90% (efisien)
6	0,81 – 1,00	88% (efisien)
7	1,01 – 1,20	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,40	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,60	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,80	78% (tidak efisien)
11	> 1,81	75% (tidak efisien)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2025

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini, diuraikan mengenai hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Deputi II BPOM selama Triwulan I Tahun 2025. Evaluasi kinerja difokuskan pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, serta realisasi anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Analisis dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi capaian pada Triwulan I, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Selain itu, pada bab ini juga disajikan evaluasi atas realisasi penggunaan anggaran Deputi II BPOM, untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja dalam kerangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Evaluasi kinerja dan anggaran ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi tindak lanjut dan strategi perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya, dalam rangka memastikan tercapainya sasaran strategis Deputi II BPOM Tahun 2025 secara optimal.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan realisasi kinerja pada triwulan I tahun 2025, yang capaian kinerjanya diukur dengan menggunakan 6 Sasaran Program dan 25 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), Deputi II BPOM mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar sebesar 92,29 masuk dalam predikat Baik. Rincian capaian kinerja dari tiap Indikator kinerja pada TW I 2025 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 6 : Nilai Kinerja Organisasi TW I tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65,00%	67,82%	104,34%	104,34%
2		Persentase Seplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,00%	87,50%	128,68%	110,00%
3		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,00%	89,72%	144,71%	110,00%
4		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00%	76,92%	92,67%	92,67%
5		Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86,00%	62,5%	72,67%	72,67%
6		Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81,00%	64,29%	79,37%	79,37%
7		Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70,00%	81,10%	115,86%	110,00%
8		Persentase fasilitas distribusi Su8plemen Kesehatan yang memenuhi 9ketentuan	89,00%	97,50%	109,55%	109,55%
9		Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78,00%	60,00%	76,92%	76,92%
10		Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78,00%	74.97%	96.12%	96.12%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11		Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87,00%	81,31%	93,46%	93,46%
12		Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71,00%	78,00%	109,86%	109,86%
13	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	40,00%	45,00%	112,50%	110,00%
					Total Capaian PK	1272,78
					Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)	97,90
					Predikat NKO	Baik

Tabel 7 Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2025

No.	Sasaran Program / Indikator Kinerja	Target (% / Nilai)	Realisasi (% / Nilai)	Capaian (%)	Kategori / Notifikai Warna
SP 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**			102,02%	Sangat baik
IKSP 1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65,00	67,82	104,34	Sangat baik
IKSP 2	Persentase Seplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,00	87,50	128,68	Tidak dapat disimpulkan
IKSP 3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,00	89,72	144,71	Tidak dapat disimpulkan
IKSP 4	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83,00	n/a	n/a	
IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00	76,92	92,67	Baik
IKSP 6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86,00	62,50	72,67	Cukup
IKSP 7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85,00	n/a	n/a	
IKSP 8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81,00	64,29	79,37	Cukup
IKSP 9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70,00	81,10	115,86	Tidak dapat disimpulkan
IKSP 10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89,00	97,50	109,55	Sangat baik
IKSP 11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78,00	60,00	76,92	Cukup
IKSP 12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78,00	74,97	96,12	Baik
IKSP 13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87,00	81,31	93,46	Baik
IKSP 14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71,00	78	109,86	Sangat baik
SP 2	**Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pemgawasan OT, SK dan Kos**			n/a	
IKSP 15	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	2,00	n/a	n/a	n/a
SP 3	**Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**			n/a	
IKSP 16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	86.87	n/a	n/a	
SP 4	**Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**			112,50	Tidak dapat disimpulkan
IKSP 17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	40,00	45,00	112,50	Tidak dapat disimpulkan
IKSP 18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	60,00	n/a	n/a	
IKSP 19	Persentase Industri Kosmetik yang mengikti program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB	56,00	n/a	n/a	

No.	Sasaran Program / Indikator Kinerja	Target (% / Nilai)	Realisasi (% / Nilai)	Capaian (%)	Kategori / Notifikai Warna
	secara penuh				
IKSP 20	Persentase Industri Obat Bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12,00	n/a	n/a	
SP 5	**Layanan Publik BPOM yang Prima**			n/a	
IKSP 21	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,70	n/a	n/a	
SP 6	**Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**			n/a	
IKSP 22	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	89,96	n/a	n/a	
IKSP 23	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	81,66	n/a	n/a	
IKSP 24	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	5,00	n/a	n/a	
IKSP 25	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kos	2,95	n/a	n/a	

Pada TW I 2025, dari 25 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), terdapat 13 Indikator yang telah dapat diukur realisasi kinerjanya, dengan hasil 4 (empat) indikator dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, 3 (tiga) indikator dengan kriteria sangat baik, 3 (tiga) indikator dengan kriteria baik, dan 3 (tiga) indikator dengan kriteria cukup. Sementara 12 indikator lainnya, belum dilakukan pengurukuran pada tri Wulan ini. Berikut adalah analisis capaian kinerja dari tiap indikator:

1. Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu

Salah satu indikator utama dalam pengukuran efektivitas pengawasan Deputi II BPOM adalah Persentase Obat Bahan Alam (OBA) yang Aman dan Bermutu. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan produk OBA terhadap ketentuan regulasi serta efektivitas sistem pengawasan post-market yang diterapkan. Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan hasil sampling terhadap produk OBA yang beredar di pasaran, kemudian dievaluasi berdasarkan lima kriteria mutu dan keamanan yang telah ditetapkan. Berikut capaian kinerjanya di triwulan I tahun 2025:

Tabel 8 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap target Triwulan I 2025

IKU	Target TW I	Realisasi TW 1	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65.00%	67.82%	104.34%	Sangat Baik

Target Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu pada TW I 2025 adalah sebesar 65,00% dengan realisasi sebesar 67,82%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 104,34%, masuk dalam kategori sangat baik. Realisasi kinerja di TW ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya. Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 9 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW 1	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65,00%	67,82%	104,34%	Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja pada TW I 2025 adalah sebesar 104,34%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai bahkan melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan I Tahun 2025, Deputi II BPOM berhasil mencapai realisasi sebesar 67,82% dari target 65%, atau setara dengan 104,34% terhadap target triwulanan. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk OBA yang disampling memenuhi kriteria keamanan dan mutu yang ditetapkan.

Keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi pelaksanaan pengawasan post-market yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, serta sinergi dengan unit pelaksana teknis di daerah.

Faktor yang turut mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

- Implementasi sistem Sampling dan Pengujian berbasis risiko, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 95 Tahun 2025

- Pemanfaatan data pengawasan sebelumnya untuk pemetaan prioritas,
- Peningkatan frekuensi pengawasan sarana produksi dan distribusi OBA,
- Serta sosialisasi aktif kepada pelaku usaha mengenai pemenuhan syarat mutu dan perizinan.

Hasil ini sekaligus mencerminkan efektivitas program pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha OBA, serta meningkatnya kesadaran industri terhadap pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sebagai dasar menjaga keberlangsungan usaha dan perlindungan masyarakat.

Dengan pencapaian ini, Deputi II BPOM akan terus mengintensifkan upaya pengawasan, melakukan perbaikan sistem pemantauan mutu, serta memperkuat kerja sama lintas sektor untuk mempertahankan dan meningkatkan persentase produk OBA yang memenuhi syarat keamanan dan mutu di triwulan berikutnya.

2. Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu

Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pengawasan produk post-market oleh Deputi II BPOM, khususnya dalam menjamin kualitas dan keamanan suplemen kesehatan yang beredar di masyarakat.

Indikator ini diukur berdasarkan hasil sampling produk suplemen kesehatan dari sarana distribusi dan penjualan, yang kemudian dinilai berdasarkan lima kriteria kelayakan mutu dan keamanan. Berikut capaian kinerjanya di triwulan I tahun 2025:

Tabel 10 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Triwulan I 2025

IKU	Target TW I	Realisasi TW 1	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,00%	87,50%	128,68%	Tidak Dapat Disimpulkan

Target Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu pada TW I 2025 adalah sebesar 68,00% dengan realisasi sebesar 87,50%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 128,68%, masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Realisasi kinerja di TW

ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya. Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 11 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW 1	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,00%	87,50%	128,68%	Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja pada TW I 2025 adalah sebesar 128,68%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai bahkan melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan I Tahun 2025, Deputi II BPOM menetapkan target capaian sebesar 68%, dan berhasil mewujudkan realisasi sebesar 87,50%, atau setara dengan 128,68% dari target.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk suplemen kesehatan yang disampling telah memenuhi seluruh kriteria keamanan dan mutu yang ditetapkan, dengan tingkat kepatuhan pelaku usaha yang cukup tinggi.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan strategi pengawasan dan pembinaan, antara lain melalui:

- Implementasi sistem Sampling dan Pengujian berbasis risiko, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 95 Tahun 2025
- Pembinaan teknis berkelanjutan kepada pelaku usaha suplemen kesehatan,
- Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar keamanan dan mutu,
- Koordinasi intensif antara pusat dan UPT BPOM dalam pelaksanaan sampling dan pengujian.

Capaian ini juga mengindikasikan bahwa upaya Deputi II dalam memperkuat pengawasan terhadap produk-produk yang berpotensi dikonsumsi secara rutin oleh masyarakat telah berjalan efektif.

Tingginya tingkat pemenuhan standar mutu produk suplemen kesehatan berkontribusi besar terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, serta mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar secara legal di pasar domestik.

Ke depan, Deputi II BPOM akan terus memperkuat strategi pengawasan berbasis bukti dan risiko, meningkatkan kapasitas laboratorium pengujian, serta memperluas edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan tren positif capaian indikator ini pada triwulan-triwulan berikutnya.

3. Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu

Indikator ini bertujuan untuk menilai sejauh mana produk kosmetik yang beredar di pasar memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku terkait keamanan dan mutu produk, serta sejauh mana pelaksanaan pengawasan telah berhasil mengurangi peredaran produk yang tidak memenuhi syarat. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil sampling targeted/purposive, sesuai dengan Pedoman Sampling Kosmetik yang berlaku pada tahun berjalan. Berikut capaian kinerjanya di triwulan I tahun 2025:

Tabel 12 :Perbandingan realisasi kinerja Persentase Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap target Triwulan I 2025

IKU	Target TW I	Realisasi TW 1	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,00%	89,72%	144,71%	Tidak Dapat Disimpulkan

Target pada TW I 2025 adalah sebesar 62,00% dengan realisasi sebesar 89,72%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 144,71%, masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Realisasi kinerja di TW ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di TW

sebelumnya. Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 13 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW 1	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,00%	89,72%	144,71%	Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja pada TW I 2025 adalah sebesar 144,71%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai bahkan melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan I Tahun 2025, Deputi II BPOM menetapkan target capaian indikator sebesar 62,00%, dan berhasil merealisasikan capaian sebesar 89,72%, atau setara dengan 144,71% dari target triwulanan.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategi pengawasan berbasis risiko yang diterapkan, serta efektivitas sistem pengawasan terintegrasi antara pusat dan daerah.

Keberhasilan ini ditopang oleh beberapa faktor utama, di antaranya:

- Pemilihan sampel yang lebih tajam dan berbasis risiko tinggi, sehingga hasil evaluasi lebih menggambarkan efektivitas pengawasan,
- Koordinasi intensif dengan UPT BPOM dalam pelaksanaan sampling dan pemantauan peredaran kosmetik di daerah,
- Peningkatan kapasitas laboratorium pengujian dan tenaga teknis dalam mendeteksi kandungan bahan berbahaya yang dilarang dalam kosmetik,
- Pendekatan preventif melalui edukasi dan peringatan kepada pelaku usaha serta intensifikasi pengawasan iklan dan promosi kosmetik.

Tingginya persentase produk kosmetik yang memenuhi kriteria aman dan bermutu pada Triwulan I ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan program pengawasan Deputi II,

tetapi juga mengindikasikan peningkatan kesadaran pelaku usaha kosmetik dalam memenuhi regulasi yang berlaku.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, Deputi II BPOM akan terus melakukan pemantauan berkelanjutan, menyempurnakan strategi sampling dan penindakan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan peredaran produk kosmetik ilegal atau tidak memenuhi syarat di pasaran

4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan OBA, SK, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor merupakan indikator yang mencerminkan efektivitas koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Badan POM. Semakin tinggi capaian indikator ini, semakin baik keterlibatan dan komitmen lintas sektor dalam mendukung pengawasan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Berikut capaian kinerjanya di triwulan I tahun 2025:

Tabel 14 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor terhadap target Triwulan I 2025

IKU	Target TW I	Realisasi TW 1	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00%	76,92%	92,67%	Baik

Target pada TW I 2025 adalah sebesar 83,00% dengan realisasi sebesar 76,92%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 92,67%, masuk dalam kategori baik. Realisasi kinerja di TW ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya. Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 15 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW 1	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00%	76,92%	92,67%	Akan tercapai

Capaian kinerja pada TW I 2025 adalah sebesar 90,49%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan I Tahun 2025, capaian indikator ini sebesar 76,92% dari target yang ditetapkan yaitu 83,00%, atau setara dengan 92,67% capaian terhadap target. Meskipun tergolong mendekati target, capaian ini belum memenuhi ambang batas minimal.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya capaian indikator ini, antara lain:

1. Respons yang belum optimal dari instansi lintas sektor terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh Deputi II BPOM, khususnya terkait penindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan.

2. Kurangnya mekanisme umpan balik yang cepat dan terdokumentasi dari instansi terkait atas tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap rekomendasi BPOM.

3. Beragamnya prioritas dan kapasitas kelembagaan di daerah, terutama pada pemda dan unit pelaksana teknis lainnya, yang menyebabkan ketidaksinkronan antara urgensi pengawasan dengan kemampuan penindakan administratif atau hukum.

4. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi bersama atau platform koordinasi digital, yang dapat mempercepat dan mempermudah pemantauan tindak lanjut rekomendasi lintas sektor.

5. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti masih terbatas karena beberapa hasil pengawasan membutuhkan verifikasi atau investigasi lanjutan sebelum dapat ditindaklanjuti secara administratif oleh instansi lain.**

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Deputi II BPOM telah menjalankan fungsinya dalam menyampaikan hasil pengawasan secara tepat waktu dan substansial, keberhasilan indikator ini sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektor, kapasitas institusi lain, serta adanya sistem pendukung pelaporan yang terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut, Deputi II akan memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan lintas sektor melalui penyusunan mekanisme komunikasi tindak lanjut yang lebih formal dan terstruktur, peningkatan pelatihan lintas sektor, serta penguatan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam memfasilitasi koordinasi dan pelaporan tindak lanjut rekomendasi pengawasan di tingkat daerah.

5. Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu ukuran efektivitas pengawasan Deputi II BPOM terhadap fasilitas produksi OBA dalam memenuhi persyaratan teknis dan regulasi yang ditetapkan, termasuk penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Indikator ini menjadi penting karena secara langsung berkaitan dengan jaminan mutu dan keamanan produk OBA yang dikonsumsi masyarakat. Berikut capaian kinerjanya di triwulan I tahun 2025:

Tabel 16 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025

IKU	Target TW I	Realisasi TW 1	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86,00%	62,50%	72.67%	Cukup

Target pada TW I 2025 adalah sebesar 86,00% dengan realisasi sebesar 62,50%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 72,67%, masuk dalam kategori cukup. Realisasi kinerja di TW ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya.

Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 17 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW 1	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86,00%	62,50%	72.67%	Akan tercapai

Capaian kinerja pada TW I 2025 adalah sebesar 72,67%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan I Tahun 2025, capaian indikator ini sebesar 62,50%, dari target yang ditetapkan sebesar 86,00%, atau setara dengan 72,67% dari target. Berdasarkan capaian ini, indikator dinilai belum berhasil memenuhi ekspektasi kinerja dan dikategorikan sebagai “cukup” dalam evaluasi kinerja Deputi II.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya capaian indikator ini antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan CPOTB, terutama pada sarana produksi skala mikro dan kecil, yang mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, dan pemahaman teknis terhadap regulasi produksi yang baik.

2. Masih terbatasnya pendampingan teknis intensif kepada pelaku usaha OBA, terutama dalam hal implementasi CPOTB secara penuh, mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan dan beban wilayah kerja yang luas.

3. Kegiatan pembinaan dan sertifikasi sarana produksi yang masih terkendala oleh faktor anggaran dan waktu pelaksanaan, yang menyebabkan sebagian sarana belum sempat mendapatkan evaluasi atau pembinaan lanjutan.

4. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap risiko ketidaksesuaian sarana produksi terhadap keamanan produk, sehingga motivasi untuk memenuhi ketentuan CPOTB belum merata.

Hasil ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas dan kepatuhan fasilitas produksi OBA di lapangan, terutama pada pelaku usaha kecil yang membutuhkan intervensi dan fasilitasi lebih intensif.

Sebagai tindak lanjut, Deputi II BPOM akan memperkuat strategi pembinaan melalui pendekatan berbasis risiko, meningkatkan intensitas pendampingan CPOTB bertahap, memperluas bimbingan teknis kepada pelaku usaha, serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor terkait untuk mendukung penguatan sarana produksi OBA yang berdaya saing namun tetap memenuhi standar mutu dan keamanan.

6. Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan fasilitas produksi suplemen kesehatan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk penerapan Cara Pembuatan Produk yang Baik (CPPKB). Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana pelaku usaha telah memenuhi ketentuan teknis produksi, seperti kesesuaian sarana dan prasarana, dokumentasi mutu, serta pengendalian proses produksi. Berikut capaian kinerjanya di triwulan I tahun 2025:

Tabel 18 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025

IKU	Target TW I	Realisasi TW 1	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85,00%	n/a	n/a	n/a

Target pada TW I 2025 adalah sebesar 85,00% namun realisasi kinerja pada triwulan inin belum tersedia. Realisasi kinerja di TW ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di TW

sebelumnya. Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 19 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW 1	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85,00%	n/a	n/a	n/a

Analisis penyebab kegagalan

Target pada TW I 2025 adalah sebesar 85,00%, namun demikian, pada Triwulan I Tahun 2025, indikator ini belum dapat dinilai karena belum tersedianya data hasil pengawasan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM.

Kondisi ini menyebabkan tidak adanya realisasi yang dapat dijadikan dasar perhitungan capaian, sehingga indikator tidak dapat dianalisis atau dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk triwulan berjalan.

Beberapa penyebab belum tersedianya data tersebut antara lain:

1. Belum dilaksanakannya kegiatan pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan oleh UPT BPOM pada triwulan pertama, baik karena keterbatasan waktu pelaksanaan, belum terjadwalnya kegiatan.

2. Penjadwalan ulang kegiatan pengawasan oleh UPT, yang kemungkinan baru akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya setelah adanya sinkronisasi antara rencana kerja pusat dan pelaksanaan teknis di lapangan.

3. Terbatasnya alokasi anggaran dan sumber daya pada awal tahun, yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan di tingkat operasional daerah.

4. Keterlambatan pelaporan atau konsolidasi data hasil pengawasan dari UPT ke tingkat pusat, yang berimplikasi pada belum terintegrasinya data dalam sistem pemantauan capaian indikator Deputi II BPOM.

Situasi ini menjadi catatan penting bahwa keberhasilan pengukuran indikator sangat bergantung pada ketersediaan data lapangan yang valid dan tepat waktu. Sebagai tindak lanjut, Deputi II BPOM akan melakukan koordinasi lebih intensif dengan UPT BPOM, menyusun kembali penjadwalan kegiatan pengawasan secara nasional, serta mempercepat mekanisme pelaporan data hasil pengawasan, agar indikator ini dapat dievaluasi secara optimal pada triwulan-triwulan berikutnya.

7. Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan industri kosmetik dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Berikut capaian kinerjanya di triwulan I tahun 2025:

Tabel 20 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025

IKU	Target TW I	Realisasi TW 1	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81,00%	64,29%	79,37%	Cukup

Target pada TW I 2025 adalah sebesar 81,00% dengan realisasi sebesar 64,29%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 79,37%, masuk dalam kategori cukup. Realisasi kinerja di TW ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya. Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 21 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW 1	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81,00%	64,29%	79,37%	Akan tercapai

Capaian kinerja pada TW I 2025 adalah sebesar 79,37%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan I Tahun 2025, indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 79,37% dari target 81,00%, atau setara dengan 79,37% capaian terhadap target. Dengan demikian, indikator ini dikategorikan “cukup” dan dinyatakan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab belum tercapainya target indikator ini antara lain:

1. Tingginya variasi tingkat pemenuhan standar CPKB oleh pelaku usaha, terutama pada industri kecil dan menengah yang belum mampu sepenuhnya mengimplementasikan seluruh aspek dalam pedoman CPKB secara menyeluruh. Aspek yang umum belum dipenuhi meliputi dokumentasi mutu, validasi proses, dan pengendalian lingkungan produksi.

2. Masih adanya sarana produksi yang ditemukan tidak memenuhi ketentuan, baik karena penggunaan bahan baku yang belum terdokumentasi dengan baik, ketidaksesuaian tata letak fasilitas produksi, atau belum optimalnya pengendalian mutu internal.

3. Keterbatasan sumber daya pengawasan dan waktu pelaksanaan audit, yang menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh sarana yang berisiko, khususnya pada awal tahun anggaran.

4. Perbedaan tingkat pemahaman terhadap regulasi antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil, yang menyebabkan ketimpangan tingkat kepatuhan antar jenis industri kosmetik.

Hasil ini mengindikasikan bahwa strategi pengawasan sarana produksi kosmetik perlu diperkuat, baik dari sisi intensitas pemeriksaan maupun pendekatan pembinaan teknis kepada pelaku usaha.

Untuk itu, Deputi II BPOM akan mengambil langkah-langkah perbaikan melalui intensifikasi bimbingan teknis CPKB, peningkatan kapasitas personel industri, serta koordinasi lebih erat dengan UPT BPOM guna memperluas cakupan pengawasan secara nasional.

Deputi II juga akan terus mengembangkan metode pengawasan berbasis risiko dan meningkatkan digitalisasi pelaporan hasil audit sarana produksi, agar pelaksanaan pengawasan menjadi lebih terarah, efisien, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan industri kosmetik di Indonesia.

8. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan Deputi II BPOM terhadap rantai distribusi produk OBA. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan fasilitas distribusi terhadap persyaratan teknis, administratif, dan kualitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk aspek penyimpanan, pengangkutan, pencatatan, dan dokumentasi distribusi. Berikut capaian kinerjanya di triwulan I tahun 2025:

Tabel 22 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025

IKU	Target TW I	Realisasi TW 1	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70,00%	81,10%	115,86%	Tidak dapat disimpulkan

Target pada TW I 2025 adalah sebesar 70,00% dengan realisasi sebesar 81,10%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 115,86%, masuk dalam kategori sangat tidak dapat disimpulkan. Realisasi kinerja di TW ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya. Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 23 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW 1	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70,00%	81,10%	115,86%	Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja pada TW I 2025 adalah sebesar 115,86%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai bahkan melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan I Tahun 2025, indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 81,10% dari target 70,00%, atau setara dengan 115,86% capaian terhadap target. Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha distribusi OBA terhadap regulasi, yang merupakan hasil dari kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, dan sosialisasi regulasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Deputi II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM.

2. Pelaksanaan pengawasan distribusi (sarana importir dan depot jamu) yang semakin sistematis dan berbasis risiko, yang memungkinkan identifikasi lebih dini terhadap potensi ketidaksesuaian, serta pemberian rekomendasi perbaikan yang lebih cepat dan tepat sasaran.

3. Penerapan sistem dokumentasi dan pencatatan distribusi yang lebih tertib oleh pelaku usaha, terutama dalam hal pengendalian stok, pelacakan produk, dan pengarsipan dokumen yang mendukung audit kepatuhan.

4. Peningkatan peran UPT BPOM dalam pengawasan sarana distribusi di daerah, yang memperkuat jangkauan dan efektivitas pengawasan post-market secara nasional.

5. Kerja sama yang lebih baik antara BPOM dan asosiasi/distributor, sehingga pelaku usaha lebih proaktif dalam memenuhi standar distribusi dan melakukan perbaikan atas hasil audit sebelumnya.

Capaian ini mencerminkan bahwa strategi pengawasan distribusi yang dilaksanakan oleh Deputi II BPOM telah berjalan secara efektif dan mampu mendorong perubahan perilaku kepatuhan di tingkat pelaku usaha.

Ke depan, Deputi II akan terus memperkuat pendekatan pembinaan berbasis risiko, mengembangkan sistem digital monitoring fasilitas distribusi, serta mengintensifkan pengawasan untuk menjaga tren capaian kinerja yang positif dalam mendukung jaminan mutu dan keamanan produk OBA yang beredar di masyarakat.

9. Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas pengawasan post-market Deputi II BPOM, khususnya dalam memastikan bahwa proses distribusi produk suplemen kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha distribusi terhadap aspek legalitas, pencatatan, sistem penyimpanan, pelacakan produk, dan pemenuhan standar fasilitas distribusi. Berikut capaian kinerjanya di triwulan I tahun 2025:

Tabel 24 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025

IKU	Target TW I	Realisasi TW 1	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89,00%	97,50%	109,55%	Sangat Baik

Target pada TW I 2025 adalah sebesar 89,00% dengan realisasi sebesar 97,50%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 109,55%, masuk dalam kategori sangat baik. Realisasi kinerja di TW ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya. Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 25 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW 1	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89,00%	97,50%	109,55%	Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja pada TW I 2025 adalah sebesar 109,55%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai bahkan melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan I Tahun 2025, indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 97,50%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 89,00%, atau setara dengan 109,55% capaian terhadap target. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian ini dikategorikan “Sangat Baik” dan menunjukkan keberhasilan signifikan dalam implementasi sistem pengawasan fasilitas distribusi suplemen kesehatan.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor utama:

1. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha distribusi terhadap regulasi, yang merupakan hasil dari pendekatan pembinaan dan edukasi intensif oleh BPOM serta sosialisasi berkelanjutan terkait standar distribusi suplemen kesehatan.

2. Pengawasan berbasis risiko yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang memungkinkan pengawasan lebih tepat sasaran terhadap sarana distribusi berisiko tinggi.

3. Adanya kegiatan pendampingan dan verifikasi teknis kepada fasilitas distribusi oleh petugas pengawasan BPOM, yang mempercepat proses koreksi terhadap temuan ketidaksesuaian dan memastikan tindakan perbaikan dijalankan.

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan distribusi yang diterapkan Deputi II BPOM tidak hanya berhasil menurunkan tingkat ketidaksesuaian, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem distribusi produk suplemen kesehatan yang lebih transparan, tertib, dan akuntabel.

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian ini pada triwulan berikutnya, Deputi II BPOM akan terus memperluas cakupan pengawasan, memperkuat pelatihan kepada petugas dan pelaku usaha, serta mengembangkan mekanisme pelaporan digital yang terintegrasi antara pusat dan daerah guna memastikan monitoring distribusi yang berkelanjutan.

10. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pengawasan Deputi II BPOM terhadap kepatuhan sarana distribusi kosmetik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini mencakup pemenuhan aspek legalitas, sistem penyimpanan yang sesuai, ketertelusuran produk, pencatatan distribusi, serta kelayakan fasilitas fisik dan manajemen mutu distribusi kosmetik. Berikut capaian kinerjanya di triwulan I tahun 2025:

Tabel 26 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025

IKU	Target TW I	Realisasi TW 1	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78,00%	60,00%	76,92%	Cukup

Target pada TW I 2025 adalah sebesar 78,00% dengan realisasi sebesar 60,00%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 76,92%, masuk dalam kategori cukup. Realisasi kinerja di TW ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya.

Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 27 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW 1	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78,00%	60,00%	76,92%	Akan tercapai

Capaian kinerja pada TW I 2025 adalah sebesar 76,92%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi indikator ini sebesar 60,00% dari target sebesar 78,00%, atau setara dengan 76,92% capaian terhadap target. Beberapa faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya target indikator ini antara lain:

1. Masih rendahnya kepatuhan fasilitas distribusi kosmetik terhadap standar yang ditetapkan.
2. Tingginya jumlah pelaku distribusi kosmetik informal atau tidak terdaftar, yang cenderung belum memahami atau menerapkan prinsip-prinsip distribusi kosmetik yang baik, terutama di wilayah dengan pengawasan terbatas.
3. Kurangnya pembinaan teknis secara menyeluruh kepada pelaku usaha distribusi, terutama pada distributor skala kecil dan menengah yang belum terjangkau oleh program pendampingan atau sosialisasi regulasi secara rutin.
4. Keterbatasan waktu dan cakupan pelaksanaan pengawasan pada awal tahun, termasuk faktor administratif dan teknis dalam pelaporan hasil pengawasan dari UPT ke pusat, yang berpotensi memengaruhi akurasi data rekapitulasi capaian (pemeriksaan sarana dilakukan untuk sarana yang sangat berisiko).

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan distribusi kosmetik masih menghadapi tantangan, baik dari aspek jumlah dan jenis pelaku usaha, maupun dari sisi kapasitas internal pelaksanaan pengawasan.

Sebagai tindak lanjut, Deputi II BPOM akan mengarahkan upaya perbaikan melalui:

- Peningkatan intensitas bimbingan teknis kepada pelaku distribusi kosmetik,
- Penguatan sinergi dengan UPT dalam pengawasan dan pelaporan,
- Pemetaan risiko distribusi berdasarkan wilayah dan jenis usaha agar strategi pengawasan lebih terfokus dan efektif.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian indikator ini dapat ditingkatkan pada triwulan berikutnya dan mendorong terciptanya sistem distribusi kosmetik yang lebih tertib, patuh, dan akuntabel.

11. Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Iklan Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan periklanan produk OBA yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap iklan OBA bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat objektif, tidak menyesatkan, dan tidak mengandung klaim berlebihan yang dapat membahayakan konsumen atau menurunkan kepercayaan terhadap produk legal. Berikut capaian kinerjanya di triwulan I tahun 2025:

Tabel 28 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025

IKU	Target TW I	Realisasi TW 1	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78,00%	74,97%	96,12%	Baik

Target pada TW I 2025 adalah sebesar 78,00% dengan realisasi sebesar 74,97%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 96,12% masuk dalam kategori baik.

Realisasi kinerja di TW ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya. Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 29 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW 1	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78,00%	74,97%	96,12%	Akan tercapai

Capaian kinerja pada TW I 2025 adalah sebesar 96,12%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan I Tahun 2025, indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 74,97% dari target 78,00%, atau setara dengan 96,12% capaian terhadap target. Adapun beberapa faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya target indikator ini antara lain:

1. Masih banyaknya pelaku usaha yang mempromosikan OBA dengan cara yang tidak sesuai ketentuan, seperti menyampaikan klaim khasiat yang melebihi fungsi sebenarnya atau menggunakan testimoni dan istilah medis tanpa dasar ilmiah.

2. Iklan yang disebarluaskan melalui media digital dan media sosial sulit dikendalikan secara real time, terutama pada akun-akun reseller, afiliasi, dan individu yang tidak memiliki izin edar atas produk yang diiklankan.

3. Maraknya kontrak distribusi produk dan iklan dibuat oleh pihak distributor tanpa pengawasan oleh produsen dan pemegang izin edar. Sehingga iklan tersebut sulit dikendalikan secara langsung dan tanpa pemahaman yang memadai terhadap regulasi periklanan. Hal ini menambah kompleksitas pengawasan dan menyebabkan banyak iklan yang tidak memenuhi ketentuan

4. Kurangnya pemahaman pelaku usaha, terutama UMKM, mengenai batasan promosi yang diperbolehkan, termasuk kewajiban mencantumkan pernyataan sesuai label.

5. Keterbatasan kapasitas pengawasan iklan secara proaktif dan menyeluruh, baik dari sisi jumlah personel pengawas maupun keterbatasan sistem pelaporan pelanggaran iklan di berbagai platform digital.

6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor, misalnya dengan Kominfo atau platform digital, untuk menurunkan atau memblokir iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan secara cepat dan tuntas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan terhadap iklan OBA masih menghadapi tantangan di tengah masifnya penggunaan media digital dalam pemasaran produk, khususnya oleh pihak-pihak yang tidak terdaftar secara resmi sebagai pemilik produk.

Sebagai langkah perbaikan, Deputi II BPOM akan memperkuat strategi pengawasan iklan OBA melalui:

- Peningkatan intensifikasi pengawasan promosi, melalui Forum Monitoring dan Evaluasi Bersama UPT BPOM

- Kolaborasi dengan platform media sosial dan Kominfo,

- Penguatan edukasi kepada pelaku usaha mengenai etika dan regulasi iklan, melalui Kegiatan FONDASI (Forum Koordinasi Iklan dan Penandaan) khusus bagi UKOT dan distributor yang melakukan kontrak distribusi. Diharapkan produsen dan distributor dapat memahami regulasi periklanan serta meningkatkan komitmen dalam kepatuhan regulasi

- Penyusunan petunjuk teknis iklan bagi pelaku usaha sehingga dapat memudahkan pelaku usaha membuat promosi / iklan sesuai ketentuan.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan menekan penyebaran iklan yang menyesatkan, sehingga capaian indikator ini dapat meningkat pada triwulan-triwulan berikutnya

12. Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memasarkan produk suplemen kesehatan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan terhadap iklan menjadi krusial karena iklan merupakan sarana utama penyampaian informasi kepada konsumen, dan pelanggaran dalam penyampaian pesan promosi dapat menyesatkan masyarakat serta berdampak pada keselamatan dan kepercayaan publik. Berikut capaian kinerjanya di triwulan I tahun 2025:

Tabel 30 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025

IKU	Target TW I	Realisasi TW 1	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87,00%	81,31%	93,46%	Baik

Target pada TW I 2025 adalah sebesar 87,00% dengan realisasi sebesar 81,31%%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 93,46%, masuk dalam kategori Baik. Realisasi kinerja di TW ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya. Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 31 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW 1	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87,00%	81,31%	93,46%	Akan tercapai

Capaian kinerja pada TW I 2025 adalah sebesar 88,00%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi indikator ini sebesar 81,31% dari target sebesar 87,00%, atau setara dengan capaian 93,46% terhadap target. Beberapa penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

1. Tingginya intensitas pelanggaran promosi di media digital, yang dilakukan oleh pihak ketiga (reseller atau afiliasi) yang tidak memiliki akses langsung terhadap edukasi regulasi, sehingga meningkatkan angka pelanggaran di luar kendali langsung pelaku usaha resmi

2. Belum meratanya pemahaman pelaku usaha (terutama importir) terhadap batasan promosi suplemen kesehatan, seperti klaim manfaat yang menyerupai khasiat obat, penggunaan testimoni berlebihan, atau penyebaran konten promosi tanpa mencantumkan nomor izin edar dan label sesuai ketentuan.

3. Terbatasnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan promosi bermasalah, misalnya dengan penyedia platform iklan online, yang menyebabkan proses penindakan terhadap iklan yang melanggar menjadi kurang efektif.

Kondisi ini menandakan bahwa meskipun capaian numerik indikator melampaui target, kualitas pengawasan dan sistem pelaporannya belum cukup kuat untuk menyimpulkan secara meyakinkan keberhasilan kinerja secara nasional. Artinya, capaian kuantitatif tidak selalu mencerminkan capaian substantif.

Sebagai upaya perbaikan ke depan, Deputi II BPOM akan:

- Menguatkan edukasi dan komunikasi risiko kepada pelaku usaha, serta

- Menyusun petunjuk teknis iklan bagi pelaku usaha sehingga memudahkan pelaku usaha membuat promosi / iklan sesuai ketentuan

- Menjalin kerja sama dengan platform digital dan Kominfo untuk mempercepat respons terhadap promosi yang melanggar.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan terhadap iklan suplemen kesehatan menjadi lebih efektif, menyeluruh, dan berdampak nyata dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan konsumen.

13. Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas pengawasan promosi produk kosmetik di berbagai kanal, termasuk media cetak, elektronik, dan digital. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait produk kosmetik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menyesatkan, tidak overclaim, dan tidak menyalahgunakan persepsi publik terhadap fungsi kosmetik. Berikut capaian kinerjanya di triwulan I tahun 2025:

Tabel 32 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I 2025

IKU	Target TW I	Realisasi TW 1	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71,00%	78,00	109,86%	Sangat Baik

Target pada TW I 2025 adalah sebesar 71,00% dengan realisasi sebesar 78,00%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 109,86%, masuk dalam kategori sangat baik. Realisasi kinerja di TW ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya. Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 33 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW 1	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71,00%	78,00	109,86%	Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja pada TW I 2025 adalah sebesar 109,86%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai bahkan melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan I Tahun 2025, indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 78,00% dari target sebesar 71,00%, atau setara dengan capaian 109,86% terhadap target. Hasil ini mencerminkan keberhasilan Deputi II BPOM dalam mengendalikan dan memandu praktik promosi kosmetik yang legal, etis, dan informatif. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas pengawasan terhadap iklan digital, melalui pemantauan sistematis yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik, termasuk penggunaan data analitik untuk mengidentifikasi pola pelanggaran iklan di media sosial dan e-commerce.

2. Sinergi antara pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pelaksanaan pengawasan lapangan, yang mendorong penyebaran informasi dan edukasi tentang aturan promosi kosmetik kepada pelaku usaha secara lebih luas dan merata.

3. Sosialisasi dan pembinaan intensif kepada pelaku usaha kosmetik, baik dalam bentuk bimbingan teknis maupun konsultasi regulasi, sehingga pelaku usaha memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai batasan klaim dan format penyampaian iklan yang diperbolehkan.

4. Ketersediaan pedoman teknis pengawasan iklan dan penandaan kosmetik yang komprehensif dan mudah diakses, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam menyesuaikan strategi promosi mereka dengan ketentuan yang berlaku.

5. Respons cepat terhadap pelanggaran, melalui pemberian surat peringatan atau tindakan administratif yang tegas terhadap pelaku usaha yang menyebarkan iklan tidak sesuai ketentuan, yang berfungsi sebagai efek jera sekaligus pencegahan terhadap pelanggaran serupa.

Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan yang menggabungkan edukasi, pengendalian, dan penegakan hukum secara seimbang telah memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi promosi kosmetik.

Ke depan, Deputi II BPOM akan terus memperkuat pengawasan promosi di ruang digital, mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan kanal informasi yang resmi dan bertanggung jawab, serta membangun kemitraan dengan platform digital dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan menjaga kredibilitas produk kosmetik yang beredar di pasar.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain: kegiatan Intensifikasi Peningkatan Literasi Beauty Enthusiast (INSPIRASI) - Kosmetik Aman yang merupakan program berkelanjutan yang dilakukan secara sinergis dengan stakeholder terkait, yang bertujuan untuk memberdayakan beauty enthusiast dalam mencerdaskan masyarakat dan berperan aktif mendukung pengawasan Kosmetik, terutama di media online.

14. Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar

Indikator Persentase Inovasi Obat Bahan Alam (OBA) yang Didampingi Sesuai Standar merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur efektivitas peran Deputi II BPOM, khususnya dalam mendukung pengembangan produk inovatif berbasis bahan alam melalui kegiatan pendampingan yang terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan regulasi. Pendampingan ini mencakup aspek pemenuhan standar keamanan, mutu, dan manfaat, serta asistensi terhadap pelaku inovasi dalam proses pendaftaran, sertifikasi, dan penguatan daya saing produk. Berikut capaian kinerjanya di triwulan I tahun 2025:

Tabel 34: Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap target Triwulan I 2025

IKU	Target TW I	Realisasi TW 1	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	40,00%	45,00%	112,50%	Tidak dapat disimpulkan

Target pada TW I 2025 adalah sebesar 40,00% dengan realisasi sebesar 45,00%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 112,50%, masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Realisasi kinerja di TW ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di TW

sebelumnya. Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 35 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW 1	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	51,00%	45,00%	88,23%	Akan tercapai

Capaian kinerja pada TW I 2025 adalah sebesar 88,23%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan I Tahun 2025, capaian indikator ini mencapai 112,50% terhadap target triwulanan, dengan realisasi sebesar 45% dari target 40%. Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:

1. Tingginya antusiasme pelaku usaha dan lembaga litbang terhadap inovasi berbasis obat bahan alam, yang mendorong permintaan terhadap layanan pendampingan dari BPOM, baik dalam bentuk coaching clinic, asistensi regulasi, maupun kolaborasi riset.

2. Optimalisasi program pendampingan inovasi kepada peneliti dan pelaku usaha yang telah dirancang secara tematik dan terstruktur, melalui pendampingan secara daring.

3. Ketersediaan tim teknis pendamping yang kompeten dan berpengalaman, serta didukung dengan panduan dan standar pendampingan yang jelas, menjadikan proses asistensi berjalan efektif dan sesuai dengan harapan pelaku usaha.

4. Dukungan digitalisasi dan sistem informasi registrasi, seperti pemanfaatan platform ASROT dan sistem perizinan online, yang mempercepat proses penyampaian dokumen dan memperkuat komunikasi antara BPOM dengan pelaku usaha atau mitra inovator.

Keberhasilan ini mencerminkan peran aktif Deputi II dalam menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif bagi pengembangan obat bahan alam di Indonesia. Selain mendukung peningkatan jumlah produk inovatif yang sesuai regulasi, kegiatan ini juga berdampak pada peningkatan daya saing industri obat tradisional, serta mendorong percepatan pemanfaatan kekayaan hayati nasional secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Ke depan, Deputi II BPOM akan terus memperluas cakupan pendampingan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta mengembangkan strategi pembinaan inovasi berbasis klaster dan rantai nilai, guna memastikan bahwa setiap produk berbasis obat bahan alam yang inovatif dapat berkembang secara aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat.

3.2 Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Belum ada tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi triwulan sebelumnya,

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Deputi II BPOM pada Triwulan I Tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.511.841.620 dari pagu efektif sebesar Rp16.145.965.000, atau setara dengan 15,56%. Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II berhasil memenuhi target realisasi anggaran triwulan I yang telah ditetapkan dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar 15% dari total pagu efektif. Keberhasilan pencapaian target ini mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang telah disusun secara realistis serta mencerminkan kedisiplinan dalam eksekusi kegiatan pada awal tahun anggaran.

Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.

Tabel 36 : Peengukuran Tingkat Efisiensi per Sasaran Program

No.	Sasaran Program	Input	Output	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	100,00%	102,02%	0,02
2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	0	n/a	n/a
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	0	n/a	n/a
4	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	100,00%	110,00%	0,1
5	Layanan Publik BPOM yang Prima		n/a	n/a

6	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		n/a	n/a

Dari tabel di atas terlihat bahwa sasaran program Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah terlaksana secara efektif dengan tingkat efiiensi 0,02. Begitu juga untuk sasaran program Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, telah terlaksana secara efektif dengan tingkat efisiensi 0,1.

BAB IV

PENUTUP

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2025

BAB IV Penutup

Pada Triwulan I Tahun 2025, Deputi II BPOM menunjukkan kinerja yang cukup solid dan terarah, sebagaimana tercermin dari nilai kinerja organisasi sebesar 97,90, yang mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan program prioritas dan efektivitas pencapaian indikator strategis. Realisasi anggaran tercapai sebesar 15,56% dari pagu efektif, melampaui target penyerapan triwulan yang ditetapkan dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar 15%. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan anggaran telah dijalankan secara disiplin dan selaras dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Beberapa indikator kinerja utama telah berhasil melampaui target, antara lain:

- Persentase Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu,
- Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan dan OBA yang Memenuhi Ketentuan,
- Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar,
- Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi pengawasan, pendampingan pelaku usaha, serta sinergi antara pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam mendukung kinerja pengawasan post-market.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target atau belum dapat diukur, antara lain indikator terkait pengawasan sarana produksi dan tindak lanjut lintas sektor. Hal ini utamanya disebabkan oleh:

- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan pada awal tahun, akibat keterbatasan waktu dan proses penjadwalan ulang kegiatan.
- Keterlambatan pelaporan dari UPT, yang berdampak pada belum tersedianya data capaian kinerja pada beberapa indikator.
- Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang masih bervariasi, khususnya pada sektor produksi dan promosi yang membutuhkan pengawasan intensif.

Menghadapi kondisi tersebut, Deputi II telah menyiapkan beberapa strategi pemecahan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya, antara lain:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan teknis dan pembinaan regulasi, khususnya terhadap indikator dengan capaian rendah atau belum berjalan.
2. Peningkatan kapasitas koordinasi dan pelaporan dengan UPT, termasuk pendampingan teknis dan integrasi sistem informasi capaian.
3. Optimalisasi penyerapan anggaran berbasis output dan hasil, agar kegiatan yang dilaksanakan berdampak langsung pada pencapaian indikator kinerja.
4. Penguatan sistem pemantauan kinerja dan pelaporan real-time, serta penyesuaian perencanaan berbasis evaluasi triwulanan.

Sebagai rekomendasi untuk peningkatan kinerja ke depan, Deputi II perlu:

- Mendorong percepatan eksekusi kegiatan prioritas dengan penjadwalan yang lebih adaptif,
- Meningkatkan monitoring internal secara berkala untuk merespons hambatan teknis secara cepat,
- Mengembangkan strategi edukasi publik dan pembinaan pelaku usaha berbasis risiko,
- Memperkuat sinergi lintas sektor dan antarunit dalam pengawasan, pembinaan, dan penindakan.

Dengan nilai kinerja organisasi yang sangat baik serta pelaksanaan program yang terus disempurnakan, Deputi II BPOM optimistis dapat meningkatkan kualitas layanan, efektivitas pengawasan, dan kontribusi nyata terhadap perlindungan kesehatan masyarakat pada triwulan-triwulan mendatang.

Lampiran

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
4. Matriks Capaian Kinerja Direktorat di Deputi II BPOM

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MOHAMAD KASHURI
Jabatan	: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Februari 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
MOHAMAD KASHURI	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65 Persen
		02 - Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68 Persen
		03 - Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62 Persen
		04 - Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83 Persen
		05 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83 Persen
		06 - Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70 Persen
		10 - Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89 Persen
		11 - Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78 Persen
		12 - Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78 Persen

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		13 - Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87 Persen
		14 - Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71 Persen
2.	02 - Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OT, SK, Kos	01 - Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	2 Jamu
3.	05 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	86.87 Indeks
4.	06 - Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	51 Persen
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	60 Persen
		03 - Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56 Persen
		04 - Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12 Persen
5.	09 - Layanan Publik BPOM yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4.7 Indeks
6.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	89.96 persen
		02 - Nlai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	81.66 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	2.95 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 51,916,739,000 (Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5,263,879,000
2.	DR.4119 - Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	9,810,472,000
3.	DR.4121 - Pengawasan Kosmetik	8,054,681,000
4.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,900,007,000
5.	DR.4128 - Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	15,661,332,000
6.	DR.6385 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	8,226,368,000

Jakarta, 11 Februari 2025

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

MOHAMAD KASHURI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	3,582,245,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	F - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OT dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah	402,573,000	201,286,500
2.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT	A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK	330,000,000	66,000,000
3.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB	164,840,000	32,968,000
4.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan	175,250,000	35,050,000
5.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah	229,910,000	45,982,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	051 - Registrasi Obat Bahan Alam	E - Rapat Evaluasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Resiko Tinggi	130,602,000	130,602,000
7.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	051 - Registrasi Obat Bahan Alam	F - Forum Komunikasi Fasilitator Registrasi dalam Rangka Perkuatan Pendampingan UMKM Start Up Obat Tradisional dan Obat Kuasi	174,100,000	174,100,000
8.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	051 - Registrasi Obat Bahan Alam	A - Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Obat Bahan Alam	426,487,000	426,487,000
9.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	A - Penilaian Pelaksanaan Uji Praklinik dan Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	59,690,000	59,690,000
10.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	051 - Registrasi Obat Bahan Alam	B - Representasi Pada Sidang Tingkat TMHS	122,400,000	122,400,000
11.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	D - Pertemuan Pembahasan Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka	326,550,000	326,550,000
12.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	051 - Registrasi Obat Bahan Alam	C - Rapat Evaluasi Registrasi Iklan Obat Bahan Alam	217,200,000	217,200,000
13.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	C - Pendampingan Dan Optimalisasi Uji Praklinik Dan Atau Uji Klinik Dalam Mendukung Hilirisasi Obat Bahan Alam Indonesia	142,390,000	142,390,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
14.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	F - Workshop Uji Praklinik/Klinik	50,990,000	50,990,000
15.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	G - Diseminasi Riset Menuju Hilirisasi Produk Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka	378,752,000	378,752,000
16.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	E - Pengayaan Uji Praklinik/Klinik	94,937,000	94,937,000
17.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	051 - Registrasi Obat Bahan Alam	D - Pemantapan Koordinasi serta Peningkatan Kerja Sama Lintas Sektor dalam rangka Percepatan Izin Edar Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	98,033,000	98,033,000
19.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	A - Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten oleh Pelaku Usaha OBA, OK dan SK	273,720,000	68,430,000
20.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	B - Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Melalui Intensifikasi Informasi Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK	128,545,000	64,272,500
21.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	B - Evaluasi Dokumen dan Data Uji Praklinik/Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	259,503,000	259,503,000
22.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	A - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Pembahasan Laporan Efek Samping OT dan SK	158,360,000	79,180,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
23.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	B - Klasterisasi Pelaku Usaha OBA, OK dan SK Untuk Tindak Lanjut Pelanggaran Penandaan	183,895,000	91,947,500
24.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	D - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk OT dan SK melalui Pendekatan Desain Baru Pengawasan	111,880,000	55,940,000
25.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	E - Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan oleh UPT Badan POM	282,360,000	141,180,000
26.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	F - Aksi Nasional Penanganan dan Pemberantasan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat	218,375,000	218,375,000

02 - Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	2,569,919,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS	D - Pengayaan Kompetensi SDM Bidang Registrasi OT, SK dan Kosmetik	168,000,000	168,000,000
2.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	052 - Registrasi Suplemen Kesehatan	A - Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Suplemen Kesehatanan	427,650,000	427,650,000
3.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	052 - Registrasi Suplemen Kesehatan	C - Review Hasil Penilaian Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	48,000,000	48,000,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS	B - Penatalaksanaan Data Arsip	171,600,000	171,600,000
5.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	052 - Registrasi Suplemen Kesehatan	D - Pembekalan Evaluator Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Tematik	363,020,000	363,020,000
6.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	052 - Registrasi Suplemen Kesehatan	B - Rapat Evaluasi Registrasi Iklan Suplemen Kesehatan	183,080,000	183,080,000
7.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS	A - Penguatan Kolaborasi Antar Sektor untuk Peningkatan Kinerja di bidang Registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	276,173,000	276,173,000
8.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS	C - Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan PNBP di lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	50,160,000	50,160,000
9.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	A - Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten oleh Pelaku Usaha OBA, OK dan SK	273,720,000	68,430,000
10.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	B - Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Melalui Intensifikasi Informasi Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK	128,545,000	64,272,500
11.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	A - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Pembahasan Laporan Efek Samping OT dan SK	158,360,000	79,180,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	B - Klasterisasi Pelaku Usaha OBA, OK dan SK Untuk Tindak Lanjut Pelanggaran Penandaan	183,895,000	91,947,500
13.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	D - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk OT dan SK melalui Pendekatan Desain Baru Pengawasan	111,880,000	55,940,000
14.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	E - Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan oleh UPT Badan POM	282,360,000	141,180,000
15.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	F - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OT dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah	402,573,000	201,286,500
16.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT	A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK	330,000,000	66,000,000
17.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah	229,910,000	45,982,000
18.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan	175,250,000	35,050,000
19.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB	164,840,000	32,968,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	3,552,695,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik	A - Risk Analisis Data Produk Kosmetik	245,890,000	245,890,000
2.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik	F - Peningkatan Kompetensi Evaluator Bidang Kosmetika	257,665,000	257,665,000
3.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik	B - Pembahasan aspek keamanan dan klaim kosmetika	200,375,000	200,375,000
4.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	A - Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik	223,980,000	223,980,000
5.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	B - Public Awareness Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang dan Penyelenggaraan Public Warning	242,450,000	242,450,000
6.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	C - Rapat Pembahasan Aktual Direktorat Pengawasan Kosmetik	32,646,000	32,646,000
7.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	D - Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	413,850,000	413,850,000
8.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik	A - Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik	519,700,000	519,700,000
9.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik	C - Pencegahan Terjadinya Pelanggaran dan Kecurangan Dalam Penandaan Kosmetik	148,400,000	148,400,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik	E - Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetika	93,840,000	93,840,000
11.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	055 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi efek samping kosmetik	B - Farmakovigilans bagi Pelaku Usaha	122,429,000	122,429,000
12.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	055 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi efek samping kosmetik	A - Peningkatan pengawasan terhadap sumber perolehan kosmetik mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang	135,710,000	135,710,000
13.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	055 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi efek samping kosmetik	C - Sampling dan pengujian kosmetik yang dibuat berdasarkan lisensi merek	66,050,000	66,050,000
14.	DR.4121.BIC.002 - Pendampingan dan Pembinaan UPT Dalam Melakukan Pengawasan Kosmetik Sesuai Standar	051 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Pengawasan Kosmetik oleh UPT BPOM	A - Pelatihan Sampling Kosmetik untuk Pusat dan Daerah	149,750,000	149,750,000
15.	DR.4121.BIC.002 - Pendampingan dan Pembinaan UPT Dalam Melakukan Pengawasan Kosmetik Sesuai Standar	051 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Pengawasan Kosmetik oleh UPT BPOM	B - Coaching Clinic Pengawasan Mutu dan Keamanan Kosmetik bagi Petugas	171,330,000	171,330,000
16.	DR.4121.BIC.002 - Pendampingan dan Pembinaan UPT Dalam Melakukan Pengawasan Kosmetik Sesuai Standar	052 - Pendampingan Kepada UPT di Bidang Kosmetik	A - Pembinaan UPT dalam rangka pengawasan kosmetik	318,000,000	318,000,000
17.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik	C - Representasi di Sidang Harmonisasi ASEAN di Bidang Kosmetika	132,400,000	132,400,000
18.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik	D - Pembahasan Notifikasi Kosmetika dengan Stakeholder dalam rangka Peningkatan Pelayanan Notifikasi Kosmetik	78,230,000	78,230,000

		04 - Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam,											83	3,598,766,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	B - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	500,000,000	500,000,000
3.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	C - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Kosmetik	750,000,000	750,000,000
4.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	A - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Obat Bahan Alam	500,000,000	500,000,000
5.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	054 - Perencanaan/Monitoring/Evaluasi pengelolaan dan kinerja di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	A - Brainstorming / Perencanaan penyusunan standar dibidang OT, SK dan Kos	44,500,000	44,500,000
6.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	054 - Perencanaan/Monitoring/Evaluasi pengelolaan dan kinerja di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	B - Peningkatan Kompetensi Pegawai	256,350,000	256,350,000
7.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	A - Sosialisasi Regulasi di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	250,000,000	250,000,000
8.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	B - Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	500,000,000	500,000,000
9.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	056 - Monitoring dan evaluasi kinerja standardisasi OT, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	A - Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	297,916,000	297,916,000
10.	DR.4129.PFA.002 - Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar OBA, SK, dan Kos	A - Penyusunan dan pembahasan regulasi Obat Bahan Alam	250,000,000	250,000,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
11.	DR.4129.PFA.002 - Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar OBA, SK, dan Kos	B - Penyusunan dan Pembahasan regulasi Suplemen kesehatan	250,000,000	250,000,000

05 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor		83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	902,584,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIC.002 - keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor	051 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Pengawasan OBA OK SK	B - Intensifikasi Pengawasan Informasi dan Promosi di Media Online	217,680,000	217,680,000
2.	DR.4119.BIC.002 - keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor	052 - Peningkatan pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK	A - Perkuatan literasi masyarakat terkait informasi dan promosi melalui optimalisasi pemanfaatan media sosial bersinergi dengan pemangku kepentingan	188,860,000	188,860,000
3.	DR.4119.BIC.002 - keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor	051 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Pengawasan OBA OK SK	A - Perkuatan Jejaring Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	93,460,000	93,460,000
5.	DR.4121.BIC.001 - Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor	051 - Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Kosmetik	B - Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0	269,624,000	269,624,000
6.	DR.4121.BIC.001 - Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor	051 - Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Kosmetik	A - Implementasi Post Border Patrol Untuk Penguatan Pengawasan Kosmetik Impor Ilegal	132,960,000	132,960,000

06 - Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	354,341,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi	C - Inspeksi Komprehensif dalam	659,550,000	164,887,500

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko		
2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	B - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	173,150,000	43,287,500
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	A - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	224,664,000	56,166,000
5.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah	229,910,000	22,991,000
6.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan	175,250,000	17,525,000
7.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB	164,840,000	16,484,000
8.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT	A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK	330,000,000	33,000,000

07 - Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	354,341,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen	A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah	229,910,000	22,991,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	suplemen kesehatan sesuai standar	Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			
2.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB	164,840,000	16,484,000
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko	659,550,000	164,887,500
5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	A - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	224,664,000	56,166,000
6.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT	A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK	330,000,000	33,000,000
7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	B - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	173,150,000	43,287,500
8.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan	175,250,000	17,525,000

08 - Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	1,694,533,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	A - Penilaian DIP	187,991,000	187,991,000
3.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika	053 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut	A - Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan	415,440,000	207,720,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	yang diselesaikan Tepat Waktu	pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik	Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat		
4.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	F - Supervisi Penilaian DIP UPT	148,448,000	148,448,000
5.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	I - Pembahasan Pedoman Pola Tindak Hasil Penilaian DIP	73,380,000	73,380,000
6.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	H - Intensifikasi Penilaian DIP dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian DIP	68,000,000	68,000,000
7.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	G - Forum Koordinasi Teknis Auditor DIP	124,725,000	124,725,000
8.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	E - Penentuan Produk Prioritas berdasarkan tingkat resiko	80,130,000	80,130,000
9.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	D - Penguatan Kapasitas Auditor DIP Kosmetik	496,672,000	496,672,000
10.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	C - Pembahasan Dan Penyusunan Pedoman Safety Assessor Kosmetika	94,330,000	94,330,000
11.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	B - Evaluasi Hasil Penilaian DIP	213,137,000	213,137,000

09 - Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	354,341,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko	659,550,000	164,887,500
2.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT	A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK	330,000,000	33,000,000
3.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB	164,840,000	16,484,000
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	A - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	224,664,000	56,166,000
5.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah	229,910,000	22,991,000
7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	B - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	173,150,000	43,287,500
8.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan	175,250,000	17,525,000

10 - Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	354,341,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan	051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT	A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan	330,000,000	33,000,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		Pengawasan OT dan SK		
2.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB	164,840,000	16,484,000
3.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah	229,910,000	22,991,000
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	A - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	224,664,000	56,166,000
5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	B - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	173,150,000	43,287,500
7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko	659,550,000	164,887,500
8.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan	175,250,000	17,525,000

11 - Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	957,720,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4121.QDI.002 - BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan	051 - Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Sarana BUPN Kosmeti	C - Upaya kolaboratif dalam rangka pengembangan dan pengawasan usaha kontrak produksi kosmetik	419,800,000	419,800,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	053 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik	A - Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat	415,440,000	207,720,000
3.	DR.4121.QDI.002 - BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan	051 - Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Sarana BUPN Kosmeti	A - Intensifikasi Pemeriksaan Sarana BUPN	201,320,000	201,320,000
4.	DR.4121.QDI.002 - BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan	051 - Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Sarana BUPN Kosmeti	B - Penyusunan Agenda Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam rangka Pengembangan dan Pengawasan Usaha Kontrak Produksi Kosmetik	128,880,000	128,880,000

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
12 - Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	500,130,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	E - Pengembangan Kompetensi Petugas Pengawas OT dan SK melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Internasional	270,000,000	135,000,000
3.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT	A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK	330,000,000	33,000,000
4.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan	175,250,000	17,525,000
5.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB	164,840,000	16,484,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	D - Capacity Building Direktorat Pengawasan OT dan SK	413,400,000	206,700,000
7.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah	229,910,000	22,991,000
8.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	A - Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten oleh Pelaku Usaha OBA, OK dan SK	273,720,000	68,430,000

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
13 - Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	500,130,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB	164,840,000	16,484,000
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	A - Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten oleh Pelaku Usaha OBA, OK dan SK	273,720,000	68,430,000
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	D - Capacity Building Direktorat Pengawasan OT dan SK	413,400,000	206,700,000
5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	E - Pengembangan Kompetensi Petugas Pengawas OT dan SK melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Internasional	270,000,000	135,000,000
6.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen	B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi	175,250,000	17,525,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	suplemen kesehatan sesuai standar	Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan		
7.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM	A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah	229,910,000	22,991,000
8.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT	A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK	330,000,000	33,000,000

	14 - Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	931,538,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik	B - Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital	434,528,000	434,528,000
3.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik	D - Inspirasi (Intensifikasi Peningkatan Literasi Beauty Enthusiast)	497,010,000	497,010,000

2.	02 - Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OT, SK, Kos	01 - Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman												2	1,000,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.6385.UBA.002 - Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	051 - Pelaksanaan Pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	A - Program Sadar Jamu Aman	1,000,000,000	1,000,000,000

3.	05 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu												86.87	5,226,369,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang	053 - Komunikasi, Informasi dan	A - KIE oleh Direktorat Pemberdayaan	2,804,570,000	2,804,570,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	Edukasi oleh Deputi II	Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos		
2.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos	E - Pengelolaan Sumber Daya Manusia	255,848,000	255,848,000
3.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos	D - Honor Pramubakti Direktorat PMPU OT, SK, Kos	66,345,000	66,345,000
4.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos	B - Layanan Perkantoran Direktorat PMPU OT, SK, Kos	107,474,000	107,474,000
5.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos	A - Koordinasi Pemberdayaan OBA, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	537,365,000	537,365,000
6.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos	C - Pemeriksaan Kesehatan	150,000,000	150,000,000
7.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos	B - Pembentukan Penyuluh dan Kader Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Aman melalui program BPOM Goes to Community	540,012,000	540,012,000
8.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos	A - Pembentukan dan Pemberdayaan Duta Kosmetik /Jamu Aman dalam rangka BPOM Goes to School/Campus	764,755,000	764,755,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
4.	06 - Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	40	40	40	41.5	41.5	41.5	42.5	42.5	42.5	45	45	51	7,028,831,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	H - Coaching Clinic Sistem dan Tata Cara Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	261,840,000	261,840,000
2.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	L - Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetik	569,378,000	569,378,000
3.	DR.4119.QDG.002 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka	052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka memproduksi fitofarmaka	C - Focus Group Discussion dalam rangka identifikasi dan penetapan fasilitas produksi Fitofarmaka bersama lintas sektor	63,680,000	63,680,000
4.	DR.4119.QDG.002 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka	052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka memproduksi fitofarmaka	A - Bimbingan teknis dalam rangka percepatan pemenuhan CPOTB pada Industri dan Usaha di bidang OBA yang memproduksi OHT dan Fitofarmaka	79,120,000	79,120,000
5.	DR.4119.QDG.002 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka	051 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini dalam rangka memproduksi fitofarmaka	A - Pemeriksaan dan Penilaian fasilitas produksi Fitofarmaka pada IEBA yang telah memenuhi CPOTB	57,200,000	57,200,000
6.	DR.4119.QDG.001 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor	052 - Koordinasi Ekosistem Ekspor Obat Bahan Alam	B - Bussiness Matching perluasan akses pasar jamu	27,750,000	27,750,000
7.	DR.4119.QDG.001 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor	052 - Koordinasi Ekosistem Ekspor Obat Bahan Alam	A - Penetrasi produk jamu berpotensi ekspor ke pasar luar negeri	297,560,000	297,560,000
8.	DR.4119.QDG.001 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor	051 - Perluasan Akses Pasar Jamu Berpotensi Ekspor	B - Jamu Export Assistance	316,285,000	316,285,000
9.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	M - Clustering Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	106,420,000	106,420,000
10.	DR.4119.QDG.001 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor	051 - Perluasan Akses Pasar Jamu Berpotensi Ekspor	A - Penyusunan Peta Potensi Pasar Jamu	158,405,000	158,405,000
12.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang	A - Forum Komunikasi Tentang Tindak Lanjut Penilaian DIP	342,438,000	342,438,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	registrasi OT, SK dan KOS			
13.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	B - Coaching clinic DIP	99,342,000	99,342,000
14.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	C - Bimbingan Teknis CUKB di bidang OT dan SK kepada peneliti, komisi etik, sponsor, organisasi riset kontrak	162,591,000	162,591,000
15.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	I - Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka Percepatan Notifikasi Kosmetik	175,820,000	175,820,000
16.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	K - Pelayanan Prima Registrasi OBA dan SK bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar	1,001,110,000	1,001,110,000
17.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	N - Clustering Notifikasi Kosmetik	24,300,000	24,300,000
18.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	O - Pendampingan UMKM Jamu Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Napak Tilas Jejak Empiris Penggunaan Bahan Alam di Indonesia	149,640,000	149,640,000
19.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	Q - Implementasi Peraturan BPOM terkait bahan kosmetika terhadap produk kosmetika yang ternotifikasi	169,090,000	169,090,000
20.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	R - Peningkatan Kompetensi UMKM dalam Pemenuhan Dosier Registrasi Obat Tradisional dan Obat Kuasi	164,600,000	164,600,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
21.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	P - Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Peningkatan Pelayanan Notifikasi Kosmetik	107,880,000	107,880,000
22.	DR.4119.BDI.002 - Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu	051 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku	A - Pemeriksaan fasilitas produksi OBA pada IEBA yang telah memenuhi CPOTB	65,330,000	65,330,000
23.	DR.4119.BDI.002 - Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu	052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku	A - Focus Group Discussion dalam rangka Penyelarasan roadmap kemandirian bahan baku OBA Nasional	81,020,000	81,020,000
24.	DR.4119.BDI.002 - Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu	052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku	B - Dialog Interaktif dalam rangka penilaian pemenuhan CPOTB pada IEBA untuk menjamin keberlangsungan mutu Bahan Baku OBA	203,650,000	203,650,000
25.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	D - Desk dan Percepatan Notifikasi khusus UMKM Kosmetik	190,220,000	190,220,000
26.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	F - Bimbingan Teknis dan Edukasi Pelaku Usaha di Bidang Kosmetika	454,492,000	454,492,000
27.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	G - OSS Jemput Bola dalam rangka percepatan penyelesaian registrasi OT, SK dan Kosmetik di Daerah	1,699,670,000	1,699,670,000

02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos						3	10	15	20	35	45	60	4,964,569,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.QDG.003 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan	051 - Akselerasi peningkatan kapasitas UMK melalui program naik kelas umk OBA Indonesia (NUANSA)	A - DESK CAPA kepada UMK di bidang Obat Bahan Alam dalam rangka Pemenuhan Program NUANSA	370,810,000	370,810,000
2.	DR.4119.QDG.003 - Keputusan Hasil Penilaian	052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi	A - Bimbingan teknis kepada UMK di bidang	289,190,000	289,190,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan	Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku	Obat Bahan Alam dalam rangka program NUANSA		
3.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	A - Penguatan Pembinaan UMKM OBA melalui Fasilitator	806,043,000	806,043,000
4.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	B - Penguatan Olahan Jamu berdasarkan Kearifan Lokal	262,080,000	262,080,000
5.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	C - Peningkatan Pangsa Pasar melalui Program UMKM Meet Market	558,660,000	558,660,000
6.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	D - Pengembangan dan Inovasi untuk Mendukung Daya Saing UMKM Obat Bahan Alam	169,450,000	169,450,000
7.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	F - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	113,267,000	113,267,000
8.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar	B - Penguatan Kapasitas Fasilitator UMKM Kosmetik	343,595,000	343,595,000
9.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar	C - Expo Kosmetik Indonesia	309,625,000	309,625,000
10.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar	D - Implementasi Program Orang Tua Angkat UMKM	264,740,000	264,740,000
11.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar	E - Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM Kosmetik	300,000,000	300,000,000
12.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar	F - Sinergitas Bersama Lintas Sektor dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kosmetik	205,045,000	205,045,000
13.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar	G - Pengembangan dan Inovasi Kosmetik Berbahan Alam Indonesia	105,345,000	105,345,000
14.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar	H - Pengelolaan Arsip dan BMN	177,669,000	177,669,000
15.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	E - Sinergitas Lintas Sektor dalam Mendukung Wellness Tourism	287,500,000	287,500,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
16.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar	A - Intensifikasi Pendampingan Start Up dan UMKM Kosmetik	401,550,000	401,550,000

		03 - Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh												56	1,100,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4121.QDI.001 - Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh	051 - Pelaksanaan Program Maturitas Industri Kosmetik Terhadap Pemenuhan Aspek CPKB	A - Akselerasi Maturitas Industri Kosmetik terhadap Pemenuhan Aspek CPKB	1,100,000,000	1,100,000,000

		04 - Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini												12	400,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BDI.001 - Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB	052 - Penyempurnaan prosedur penilaian maturitas industri OBA	A - Penyusunan Database Pengawasan dalam Rangka Penilaian Maturitas Industri Obat Bahan Alam (OBA)	122,980,000	122,980,000
3.	DR.4119.BDI.001 - Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB	051 - Pengawasan penerapan regulasi maturitas industri OBA	A - Penilaian Tingkat Maturitas Industri Obat Bahan Alam sesuai Tools Maturitas yang Ditetapkan	277,020,000	277,020,000

5.	09 - Layanan Publik BPOM yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan												4.7	8,760,036,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan	C - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat di bidang Kosmetik	73,463,000	73,463,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan	B - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat Suplemen Kesehatan	220,000,000	220,000,000
3.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan	A - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Obat Bahan Alam	170,000,000	170,000,000
4.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan	D - Peningkatan Kualitas Layanan Publik	67,778,000	67,778,000
5.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	B - Survei Kepuasan Pelanggan	329,100,000	329,100,000
6.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	D - Pemetaan Konten dan Database Aplikasi Pelayanan Publik	420,480,000	420,480,000
7.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	E - Penguatan Pelayanan Publik Prima Direktorat registrasi OT, SK dan Kos	1,086,055,000	1,086,055,000
8.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	G - Pembekalan staff dalam rangka Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Publik	270,300,000	270,300,000
9.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	H - Monev Pelayanan Pengaduan	10,200,000	10,200,000
11.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK	D - Intensifikasi Pengawasan Importir OBA dan SK dalam rangka Pengetatan Arus Impor Barang Tertentu	173,990,000	173,990,000
12.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	A - Peningkatan Kualitas Layanan Publik	932,700,000	932,700,000
13.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	C - Publikasi Layanan Publik	92,436,000	92,436,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
14.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	F - Development Dialogue dalam rangka Penguatan Tim Kerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	176,700,000	176,700,000
15.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	051 - Peningkatan pemahaman regulasi terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat	A - Bimbingan Teknis Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas Obat Tradisional dengan non-Obat Tradisional bagi UKOT	116,662,000	116,662,000
16.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	051 - Peningkatan pemahaman regulasi terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat	B - Upgrading Pemahaman Penerapan CPOTB pada Personil Kunci Industri di Bidang Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan	133,320,000	133,320,000
17.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	051 - Peningkatan pemahaman regulasi terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat	C - Pembekalan Kepada Pelaku Usaha Distribusi terkait Pelayanan Publik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	45,100,000	45,100,000
18.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK	B - Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk CAPA Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen kesehatan	174,040,000	174,040,000
19.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK	A - Pemeriksaan Sarana Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan dalam rangka Perizinan dan Pemenuhan CPOTB	375,980,000	375,980,000
20.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK	C - Verifikasi Teknis Permohonan Ekspor dan Impor OT dan SK	61,150,000	61,150,000
21.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK	A - Perkuatan Kooordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pengawasan Terhadap Eksportasi dan Importasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	154,500,000	154,500,000
22.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat	053 - Peningkatan Koordinasi dalam	B - Optimalisasi Dukungan Ekspor dan	97,125,000	97,125,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK	Perlindungan Daya Saing Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Nasional Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor		
23.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK	C - Peningkatan Peran UPT dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pemasukan OT SK melalui mekanisme SAS Barang Kiriman Peruntukan Pribadi	106,120,000	106,120,000
24.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK	D - Evaluasi Program Kerja dan Pembahasan Aktual	144,776,000	144,776,000
25.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK	E - Monitoring dan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	211,822,000	211,822,000
26.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK	F - Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Direktorat Pengawasan OT dan SK	100,925,000	100,925,000
27.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	A - Administrasi pelaksanaan pelayanan publik	306,720,000	306,720,000
28.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	B - Forum Konsultasi Publik	79,310,000	79,310,000
29.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	C - Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan Publik	92,060,000	92,060,000
30.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	D - Bimbingan Teknis kepada Petugas UPT dalam rangka Peningkayan pelayanan Publik Sertifikasi CPOTB Bertahap	85,840,000	85,840,000
31.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	E - Bimbingan teknis Bagi Petugas Dalam Rangka Peningkatan pelayanan publik SKI/SKE/SAS OT dan SK	40,560,000	40,560,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
32.	DR.6385.BAH.001 - Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima	051 - Layanan Publik Dit PMPU OTSKK yang Prima	B - Workshop Pelayanan Prima	263,900,000	263,900,000
33.	DR.6385.BAH.001 - Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima	051 - Layanan Publik Dit PMPU OTSKK yang Prima	A - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	236,100,000	236,100,000
34.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik	B - Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik	457,974,000	457,974,000
35.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik	A - Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetika	443,311,000	443,311,000
36.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik	C - Percepatan Pelayanan Publik dalam Upaya Peningkatan Daya Saing melalui Peningkatan Pengetahuan Petugas dan Pelaku Usaha	92,929,000	92,929,000
37.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik	B - Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk Konsultasi Pelayanan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik dan/atau CAPA Sertifikasi CPKB	369,510,000	369,510,000
38.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik	A - Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi	547,100,000	547,100,000

6.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												89.96	1,538,957,950

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	E - Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	144,000,000	144,000,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	G - Pemantapan Zona Integritas dalam rangka Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi	370,028,000	370,028,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	F - Medical Check Up Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	180,140,000	180,140,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	062 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK, dan Kos	A - Evaluasi Program Kerja	394,810,000	98,702,500
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	061 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos	A - Pemantapan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi	82,690,000	82,690,000
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	D - Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II	40,080,000	14,028,000
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	B - Monitoring pelaksanaan SPIP dan Pembangunan Zona Integritas	111,480,000	111,480,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	G - Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik	114,545,000	40,090,750
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	E - Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik	20,730,000	7,255,500
11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	B - Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	57,270,000	20,044,500
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	A - Pemenuhan Keperluan Perkantoran	244,282,000	85,498,700
13.	DR.4129.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data Deputi II BPOM	600,000,000	300,000,000
14.	DR.4129.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Fasilitas Kantor	170,000,000	85,000,000

02 - NIai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos													81.66	304,760,600

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	E - Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	8,400,000	8,400,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	D - Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos	9,276,000	9,276,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	A - Pemenuhan Keperluan Perkantoran	244,282,000	73,284,600
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	B - Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	57,270,000	17,181,000
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	E - Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik	20,730,000	6,219,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	G - Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik	114,545,000	34,363,500
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	D - Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II	40,080,000	12,024,000
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	061 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos	B - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH	12,310,000	12,310,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	062 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK, dan Kos	A - Evaluasi Program Kerja	394,810,000	98,702,500
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	C - Pemeliharaan Operasional Direktorat Pengawasan OT dan SK	33,000,000	33,000,000

03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos													5	960,170,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4129.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Fasilitas Kantor	170,000,000	85,000,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	B - Layanan Perkantoran Direktorat Pengawasan OT dan SK	262,950,000	262,950,000
4.	DR.4129.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data Deputi II BPOM	600,000,000	300,000,000
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	A - Honor Pengelola Keuangan Dit Pengawasan OT dan SK dan Satker Deputi II	5,880,000	5,880,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	062 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK, dan Kos	A - Evaluasi Program Kerja	394,810,000	98,702,500
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	A - Pemenuhan Keperluan perkantoran	166,720,000	166,720,000
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	F - Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan	8,400,000	8,400,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	G - Penataan dan Pengelolaan BMN	25,750,000	25,750,000
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	F - Honorarium Pengelola PNBP Direktorat Pengawasan Kosmetik	6,768,000	6,768,000

04 - Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos													2.95	425,419,950

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	062 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK, dan Kos	A - Evaluasi Program Kerja	394,810,000	98,702,500
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	B - Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	57,270,000	20,044,500
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	061 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos	C - Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	105,000,000	105,000,000
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	D - Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II	40,080,000	14,028,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	C - Pengelolaan Sistem Manajemen Terintegrasi 9001:2015	10,500,000	10,500,000
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	G - Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik	114,545,000	40,090,750

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	E - Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik	20,730,000	7,255,500
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik	A - Pemenuhan Keperluan Perkantoran	244,282,000	85,498,700
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	D - Pengelolaan Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan OT dan SK	44,300,000	44,300,000

Total	51,916,739,000

,

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691 (Hunting) 42883279, 42878164, 42883309, 4244691 ext.1044; fax: 4207683
Email : pengawasan.otsk@gmail.com; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

NOMOR HK.02.02.4.09.24.46 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 2024

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD KASHURI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

NOMOR 02.02.4.09.24.46 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2025

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65
		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	67
		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	61
		Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83
	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	20%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	84
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	87,5
	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase kemandirian pelaku usaha OBA dalam rangka inovasi obat bahan alam	51%
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	60
		Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56%
		Persentase Industri Obat bahan Alam yang meningkat maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12
	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4.69
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.68

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
		Nlai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81.45
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	95.36
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3.4

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,

MOHAMAD KASHURI

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**							
1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	capaian indikator yang telah mencapai target triwulanan	Perlu dilakukan pemantauan dan pembinaan kepada UPT dalam pelaksanaan sampling	TW4	-	Monev kepada UPT	TWII	Belum dapat disimpulkan
2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	capaian indikator yang sudah melebihi target akhir tahunnya.	Penyesuaian target Indikator dengan menggunakan hasil Reviu capaian IKU TW 1 sebagai baseline data	TW2-4	-	Penyesuaian target Indikator dengan menggunakan capaian IKU TW 1 sebagai baseline data	TW 2	Belum dapat disimpulkan
3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	Capaian indikator TW 1 melebihi dari target	Penyesuaian target Indikator dengan menggunakan hasil Reviu capaian IKU TW 1 sebagai baseline data	TW 2 - TW 4		Penyesuaian target Indikator dengan menggunakan capaian IKU TW 1 sebagai baseline data	TW 2	
4	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Belum ada realisasi kinerja, karena pengukuran baru dilakukan di akhir tahun	Segera menyusun tool untuk penilaian APM KK	TW 2 - TW 4	-	Penyusunan tools penilaian APM KK	TW IV	Belum dapat disimpulkan
5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	capaian indikator yang telah mencapai target triwulanan	tidak ada rekomendasi selama pelaksanaan TW 1					
6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Data yang masuk masih sedikit karena ada ketidakjelasan dari pelaksanaan inspeksi diUPT terkait efisiensi	Rencana alokasi target pengawasan oleh upt	TW II	-	Monev kepada UPT	TW II	
7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Belum ada pelaksanaan inspeksi	Rencana alokasi target pengawasan oleh upt	TW II	-	Monev kepada UPT	TW II	
8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Capaian Indikator pada TW 1 belum mencapai target	Mengintensifkan pembinaan pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan dengan tujuan pada pemeriksaan berikutnya terdapat perbaikan (memenuhi ketentuan).	TW 2 - TW 4		Mengintensifkan pembinaan pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan dengan tujuan pada pemeriksaan berikutnya terdapat perbaikan (memenuhi ketentuan).	TW 2 - TW 4	
9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	capaian indikator yang sudah melebihi target akhir tahunnya.	Rencana alokasi target pengawasan oleh upt	TW II	-	Monev kepada UPT	TW II	
10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Belum ada pelaksanaan inspeksi	Rencana alokasi target pengawasan oleh upt	TW II	-	Monev kepada UPT	TW II	
11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Capaian Indikator pada TW 1 belum mencapai target	melakukan monitoring dan Evaluasi realisasi terhadap hasil pengawasan UPT. Mengintensifkan pembinaan pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan dengan tujuan pada pemeriksaan berikutnya terdapat perbaikan (memenuhi ketentuan).	TW 2 - TW 4		melakukan monitoring dan Evaluasi realisasi terhadap hasil pengawasan UPT. Mengintensifkan pembinaan pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan dengan tujuan pada pemeriksaan berikutnya terdapat perbaikan (memenuhi ketentuan).	TW 2 - TW 4	
12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Terdapat strategi baru dalam intervensi pengawasan iklan di tahun 2025 yang difokuskan pada titik kritis produk dengan klaim yang berisiko tinggi:	Penyesuaian target Indikator dengan menggunakan hasil Reviu capaian IKU TW 1 sebagai baseline data	TW2-4	-	Penyesuaian target Indikator dengan menggunakan capaian IKU TW 1 sebagai baseline data	TW 2	Belum dapat disimpulkan
13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Terdapat strategi baru dalam intervensi pengawasan iklan di tahun 2025 yang difokuskan pada titik kritis produk dengan klaim yang berisiko tinggi:	Penyesuaian target Indikator dengan menggunakan hasil Reviu capaian IKU TW 1 sebagai baseline data	TW2-4	-	Penyesuaian target Indikator dengan menggunakan capaian IKU TW 1 sebagai baseline data	TW 2	Belum dapat disimpulkan
14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan							
B	**Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos**							
1	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	Merupakan kegiatan new initiative tapi tidak dilaksanakan karena semua anggaran diblokir	berkordinasi dengan Roren terkait pengukuran capaiannya	-	-	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	**Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**							
1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	belum dilakukan pengukuran capaian indikator pada TW ini	-	TW IV	-	-	TW IV	Belum dapat disimpulkan
D	**Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**							
1	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	Capaian indikator telah mencapai target triwulanan	1. Pelaksanaan webinar uji praklinik dan bimtek cukb secara berkala 2. Desk konsultasi dan pendampingan penyusunan protokol uji praklinik dan klinik lebih intensif	TW II - TW IV	Desk konsultasi dan pendampingan penyusunan protokol uji praklinik dan klinik pada kegiatan One Stop Service Registrasi OBA, SK, dan Kos	Pelaksanaan kegiatan webinar uji praklinik dan bimtek CUKB secara berkala	TW II - TW IV	Meningkatnya capaian indikator dibandingkan periode sebelumnya
2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	Pelatihan bimtek fasilitator baru dilakukan bulan Februari, setelah itu fasilitator melakukan pendampingan UMKM dan target capaian baru ada di bulan Juni	Monev pendampingan UMKM OBA dan Kos oleh fasilitator	TW II - TW IV	- Bimtek Fasilitator UMKM OBA dan Kos pada tgl 24 27 Februari 2025 -Fasilitator UMKM OBA dan Kos telah ditetapkan dalam SK Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Monev pendampingan UMKM OBA dan Kos oleh fasilitator	TW II - TW IV	
3	Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	Anggaran Kegiatan terblokir seluruhnya	berkordinasi dengan Roren terkait pengukuran capaiannya					
4	Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini							
E	**Layanan Publik BPOM yang Prima**							
1	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	belum dilakukan pengukuran capaian indikator pada TW ini	-	TW IV	-	-	TW IV	Belum dapat disimpulkan
F	**Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**							
1	Nilai Pembangunan ZI Deputi 2	belum dilakukan pengukuran capaian indikator pada TW ini	-	TW IV	-	-	TW IV	Belum dapat disimpulkan
2	Nlai AKIP Deputi 2	belum dilakukan pengukuran capaian indikator pada TW ini	-	TW IV	-	-	TW IV	Belum dapat disimpulkan
3	Nilai Kinerja Anggaran Deputi 2	belum dilakukan pengukuran capaian indikator pada TW ini	-	TW IV	-	-	TW IV	Belum dapat disimpulkan
4	Indeks Manajemen Risiko Deputi 2	belum dilakukan pengukuran capaian indikator pada TW ini	-	TW IV	-	-	TW IV	Belum dapat disimpulkan

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Triwulan I / Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	83 Nilai	n/a	n/a	100%	Belum tersedia tools untuk melakukan penilaian APM KK	Berkordinasi dengan unit terkait terkait penilaian indikator ini
2		Jumlah Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontrlbusl dalam penanganan stunting	1 Standar	n/a	n/a	0%	Anggaran untuk kegiatan ini seluruhnya diblokir, sehingga kegaitan tidak dapat terlaksana	Mengusulkan ke Rorenkeu, agar target untuk kegiatan ini dihapus, bilamana anggarannya tidak tersedia
3	Layanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.7 Indeks	n/a	n/a	100%		
4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang optimal	Nilai Pembangunan ZI	89	n/a	n/a	100%	Saat ini sedang dalam proses pengumpulan data dukung untuk penilaian pembangunan ZI	
5		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP	100%	36	36%	100%		
6		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	100%	100%	1%	100%		
7		Indeks Manajemen Risiko	2.9 Indeks	n/a	n/a	100%		

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik
Triwulan I / Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90	95.86	106.51%	100		Melakukan percepatan evaluasi dan tindaklanjut hasil pengawasan kosmetik dari UPT
2		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan	92	91.24	99.17%	100	Terdapat perubahan Status beberapa UPT yang sebelumnya loka menjadi balai sehingga masih terdapat gap kompetensi dalam penentuan hasil pengawasan kosmetik	Melakukan Monev rutin terhadap hasil pengawasan kosmetik kepada seluruh UPT
3		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	84	90	107.14%	100		Melakukan percepatan evaluasi dan tindaklanjut hasil pengawasan kosmetik dari UPT
4		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	84	93.33	111.11%	100		Melakukan percepatan evaluasi dan tindaklanjut hasil pengawasan kosmetik dari UPT
5		Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi.	70	0	0.00%	0	Anggaran untuk kegiatan ini seluruhnya diblokir, sehingga kegaitan tidak dapat terlaksana	
6		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90	100	111.11%	100		Melakukan percepatan evaluasi dan tindaklanjut hasil pengawasan kosmetik dari UPT
7		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	83.85	86.11	102.70%	100		Melakukan monev terhadap rekomendasi yang telah di kirimkan ke lintas sektor
	Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik	Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56	0	0.00%	0	Anggaran untuk kegiatan ini seluruhnya diblokir, sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.7	n/a	n/a	100		
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	94.2	94.51	100.33%	100	Jumlah permohonan yang masih tidak dapat di kendalikan jumlah nya	Melakukan perceptaan evaluasi permohonan serta penjadwalan audit sesuai denga SLA
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. Pengawasan Kosmetik	92.19	n/a	n/a	100		Menindaklanjuti hasil evaluasi ZI periode sebelumnya
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100	75	75.00%	100	Terdapat Kegiatan yang anggaran nya terblokir sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan	Melaksanakan kegiatan yang anggaran nya tidak terblokir sesuai dengan PoA

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Kosmetik sesuai standar	100	36.36	36.36%	100		
		Indeks Manajemen Risiko Dit. Pengawasan Kosmetik	3	n/a	n/a	100		

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Triwulan I / Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4		6	7	8	9
1	Meningkatnya obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	60	67.14	111.9	100%	1. Meningkatnya jumlah berkas permohonan registrasi obat bahan alam yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah SDM dan pemutakhiran sistem registrasi online 2. Masih banyaknya permohonan registrasi obat bahan alam yang memerlukan tambahan data akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha	1. Desk dan intensifikasi penyelesaian berkas registrasi produk dan iklan OBA 2. Penyelesaian berkas permohonan registrasi dan notifikasi melalui program zero stock/ stock opname/ crash program
2		Persentase peningkatan jumlah varian produk Jamu yang terdaftar	5	4.68	93.55	100%	1. Sebagian besar produk masih dalam tahap evaluasi karena pada akhir tahun 2024 dilakukan zero stock sehingga terdapat pembatasan pengajuan registrasi beberapa kategori, termasuk registrasi baru 2. Adanya efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya kegiatan pendampingan rutin ke daerah dalam rangka perceptan penerbitan izin edar	1. Dilakukan desk dan intensifikasi registrasi Jamu secara online 2. Optimalisasi fasilitator UPT BPOM dalam rangka pendampingan registrasi Jamu. 3. Kegiatan Coaching Clinic dan Bimbingan Teknis Petugas Registrasi (Regulatory Officer) dan Pelaku Usaha UMKM dalam rangka Pemenuhan Dossier Registrasi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan yang dilaksanakan di daerah sentra Jamu yaitu Semarang, Banyumas dan Yogyakarta pada tahun 2025. 4. Pembuatan perangkat pendampingan di bidang registrasi Obat Bahan Alam berupa e-book, juknis, brosur, video, maupun media lain yang dipublikasikan melalui media sosial dan subsite Direktorat Registrasi OTSKK, serta dapat menjangkau pelaku usaha maupun masyarakat umum di luar kota/di daerah, termasuk pelaku usaha yang baru berniat melakukan registrasi produk Jamu.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4		6	7	8	9
3		Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	50	67.08	134.16	100%	1. Meningkatnya jumlah berkas permohonan registrasi suplemen kesehatan yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah SDM dan pemutakhiran sistem registrasi online 2. Masih banyaknya permohonan registrasi suplemen kesehatan yang memerlukan tambahan data akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha	1. Desk dan intensifikasi penyelesaian berkas registrasi produk dan iklan SK 2. Penyelesaian berkas permohonan registrasi dan notifikasi melalui program zero stock/ stock opname/ crash program
4		Persentase kosmetik yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	78	80.18	102.79	100%	1. Meningkatnya jumlah berkas permohonan notifikasi kosmetik yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah SDM dan pemutakhiran sistem registrasi online 2. Masih banyaknya permohonan notifikasi kosmetik yang memerlukan tambahan data akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha	1. Desk dan intensifikasi penyelesaian berkas registrasi produk kosmetik 2. Penyelesaian berkas permohonan registrasi dan notifikasi melalui program zero stock/ stock opname/ crash program
5	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kosmetik terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP)	Persentase keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar	27	27.48	97.53	100%	1. Banyak berkas CAPA berulang akibat rendahnya komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan tentang DIP dan belum ditetapkannya peraturan yang mengatur pembatasan CAPA 2. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang DIP sehingga data yang disampaikan tidak sesua	Intensifikasi CAPA pada carry over tahun 2023 dan 2024 serta penilaian DIP diprioritaskan pada bagian kritis yaitu siklus ke-3 dan ke-4 untuk mempercepat penilaian keputusan DIP
6	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	90	90	100	100%	Terdapat pemblokiran anggaran, sehingga pelaksanaan pendampingan dioptimalkan secara daring	1. pelaksanaan webinar uji praklinik dan bimtek cukb secara berkala 2. desk konsultasi dan pendampingan penyusunan protokol uji praklinik dan klinik lebih intensif
7		Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif	80	93.37	116.71	100%	Terdapat pemblokiran anggaran, sehingga pelaksanaan pendampingan dioptimalkan secara daring	1. Meningkatkan kegiatan pendampingan melalui kolaborasi dengan organisasi eksternal, misalnya asosiasi pelaku usaha 2. Pelaksanaan OSS Registrasi OBA, SK, dan Kos secara jemput bola luring dan daring

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4		6	7	8	9
8		Persentase peningkatan penelitian uji praklinik dan uji klinik jamu yang didampingi sesuai standar	5	4.17	83.33	100%	1. Sedikitnya jumlah penelitian yang masuk disebabkan dana penelitian belum dapat dioptimalkan pada TW I 2. Peneliti belum dapat memenuhi baik terkait standardisasi bahan baku/produk jadi maupun metode uji sehingga belum sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku	Intensifikasi pendampingan penyusunan protokol uji praklinik/klinik
9	Layanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima	Indeks pelayanan publik Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	4.7	n/a	n/a	100%	realisasi kinerja diukur di akhir tahun	
10	Terwujudnya tata kelola pemerintah Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	91.5	n/a	n/a	100%	Unit kerja sedang menyiapkan data hasil survey analisis dampak ekonomi terhadap inovasi pelayanan publik sebagai salah satu rekomendasi penilaian ZI tahun 2024	Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian ZI tahun sebelumnya
11		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	78	80	102.56	100%	Tidak ada kendala	Memantau pelaksanaan anggaran melalui SMART DitregOTSKK untuk pengoptimalan pencapaian kinerja
12		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	36	36	100	100%	Tidak ada kendala	
13		Indeks Manajemen Resiko Dit. Registrasi OT, SK, dan kos	3.01	n/a	n/a	100%	realisasi kinerja diukur di akhir tahun	Unit kerja telah melaksanakan kegiatan Seminar Awareness Penerapan ISO 37001:2016

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Triwulan I / Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target TW 1	Realisasi	Capaian TW 1	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	5	6	7	9	10	11
1	Meningkatnya pengetahunan dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos yang aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat	5	6.5	130.00%	100	Tidak ada kendala	Melaksanakan pembentukan kader pada komunitas pendidikan
2		Persentase Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Masyarakat di Bidang OBA,SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai Pedoman	n/a	n/a	n/a	100	Tidak ada kendala	- Telah disusun tools penilaian kemandirian pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha Obat Bahan Alam dan Kosmetik oleh UPT - Akan dilakukan finalisasi dan sosialisasi tools penilaian di TW 2
3		Tingkat efektifitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89.34	85.06	95.21%	100	Kendala pelaksanaan KIE dengan tomas: - Waktu pelaksanaan sering molor - Sarana prasarana kurang memadai - Anggaran harus siap sebelum berangkat	- Pelaksanaan diisi dengan KIE dari BPOM terlebih dahulu - Pengajuan LS akan untuk perjadin petugas pusat
4	Meningkatnya efektivitas *regulatory assitance* dalam penerapan CPOTB dan CPKB oleh UMKM	Persentase fasilitator yang di bina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos	3	3.57	119.00%	100	Belum terlaksananya penandatanganan MoU karena belum mendapat jadwal ketua PBNU sehingga tidak dapat melanjutkan rencana aksi	- Monev fasilitator dalam pendampingan kepada UMKM OBA dan Kosmetik - Pendampingan UMKM di NTT - Rapat Tools Penilaian UPT dengan Roren dan UPT - Komunikasi intensif dengan ketua RMI PBNU untuk mempercepat penandatanganan MoU
5	Layanan Publik Dit.PMPU OTSKK yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Direktorat PMPU OT,SK, Kos	n/a	n/a	n/a	100	Tidak ada kendala	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik bulan April
6	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan jamu secara aktif	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan program sadar jamu aman	n/a	n/a	n/a	0	Anggaran untuk kegiatan ini seluruhnya diblokir, sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana	-
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha, OT, SK, Kos yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK dan Kos	n/a	n/a	n/a	100	Tidak ada kendala	- Pelengkapan hasil penilaian TPU 8-14 April 2025 - Pelaksanaan Jumat RB untuk meningkatkan engagement pegawai terkait RB - Benchmark ke Dit Standardisasi OTSKK

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target TW 1	Realisasi	Capaian TW 1	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	5	6	7	9	10	11
8		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat PMPU OT,SK, Kos	75	75	100.00%	100	Tidak ada kendala	- Pelaksanaan dan pemantauan kegiatan sesuai RPD dan POA - Percepatan pemberkasan Laporan Pertanggungjawaban - Koordinasi dengan Tim pelaksana serta Tim Keuangan di unit dan satker
9		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat PMPU OT, SK , KOS	36	36	100.00%	100	Tidak ada kendala	- Penyusunan Capaian RAPK TW I tahun n (1 Dokumen) → B04 - Penyusunan - Laporan Evaluasi Internal TW I tahun n (1 Dokumen) → B04
10		Indeks Manajemen Resiko Direktorat PMPU OT,SK, Kos	n/a	n/a	n/a	100	Tidak ada kendala	Update daftar risiko

BPOM
Jl. Percetakan Negara No.23
Jakarta Pusat 10560
02142484208
deputi2@gmail.com
@deputi2badanpom